

HUKUM TERHADAP HADIAH YANG TIDAK DIBERIKAN ATAS
PEMBELIAN DETERGEN DENGAN SKEMA AKAD

WAKALAH PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

(Studi Kasus di Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area Kotamadya Medan)

SKRIPSI

OLEH

ASTRI MAYSARAH SIREGAR

NIM. 24.15.3.069



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2020 M/1441 H

HUKUM TERHADAP HADIAH YANG TIDAK DIBERIKAN ATAS

PEMBELIAN DETERGEN DENGAN SKEMA AKAD

WAKALAH PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

(Studi Kasus di Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area Kotamadya Medan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S-1) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

OLEH

ASTRI MAYSARAH SIREGAR

NIM. 24.15.3.069



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2020 M/1441 H**

HUKUM TERHADAP HADIAH YANG TIDAK DIBERIKAN ATAS
PEMBELIAN DETERGEN DENGAN SKEMA AKAD
WAKALAH PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus di Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area Kotamadya Medan)

Oleh:

ASTRI MAYSARAH SIREGAR
NIM 24.15.3.069

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Nurcahaya, M.Ag
NIP. 19640206 199403 2 003

Annisa Sativa, SH, M.Hum
NIP. 19840719 200901 2 010

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah
Fakultas Syariah dan Hukum

Fatimah Zahara, MA.
NIP. 197302081999032000

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: Hukum Terhadap Hadiah Yang Tidak Diberikan Atas Pembelian Detergen Dengan Skema Akad Wakalah Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area Kotamadya Medan) telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara, tanggal 13 Juli 2020. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Muamalah.

Medan, 13 Juli 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah UIN-SU Medan
Sekretaris

Ketua

Fatimah Zahara, MA
NIP.197302081999032001

Tetty Marlina Tarigan, M. Kn
NIP.197701272007102002

Anggota-anggota

Dr. Nurcahaya, M.Ag
NIP. 19640206 199403 2 003

Annisa Sativa, SH, M. Hum
NIP. 19840719 200901 2 010

Rahmat Hidayat, Lc, M.HI
NIP. 19850509 201801 1 001

Rajin Sitepu, M.Hum
NIP. 19660309 199403 1 003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah UIN
Sumatera Utara

Dr.Zulham, S.HI, M.Hum
NIP.197703212009011008

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “Hukum Terhadap Hadiah Yang Tidak Diberikan atas Pembelian Detergen Dengan Skema Akad Wakalah Perspektif Mazhab Syafi’i (Studi Kasus di Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area Kotamadya Medan)”. Skripsi ini membahas tentang hukum terhadap hadiah piring yang tidak diberikan atas pembelian detergen Daia ukuran 900 (sembilan ratus) gram dengan menggunakan skema akad Wakalah Muqayyadah Perspektif Mazhab Syafi’i. Pemberian hadiah piring oleh Perusahaan/ produsen (*Muwakkil*) kepada Agen (*Wakil pertama*) lalu kepada Pedagang/penjual (*Wakil kedua*) untuk disampaikan kepada pembeli menggunakan akad wakalah muqayyadah. Tetapi, penulis menemukan fakta lapangan bahwa terdapat beberapa Pedagang/penjual sebagai *wakil kedua* tidak memberikan hadiah piring yang seharusnya diberikan kepada konsumen.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan dan bersifat kualitatif, biasanya penelitian ini cenderung menggunakan analisis. Tipe penelitiannya adalah yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Dalam metode pendekatan digunakan metode pendekatan *conceptual and case approach*, teknik pengumpulan data diambil dari kepustakaan dan lapangan seperti wawancara, lalu merujuk kepada kitab al- Fiqhu asy-Syafi’iyu al-Muyassar. Dan juga digunakan metode analisis kualitatif dalam hal menganalisis data.

Hasil temuan yang penulis dapat adalah beberapa Pedagang/penjual sebagai *wakil kedua* yang tidak memberikan hadiah piring (objek wakalah) kepada pembeli jika dikaitkan dengan pendapat Mazhab Syafi’i adalah batal karena tindakan yang dilakukan oleh *wakil* tidak diizinkan oleh *muwakkil* dan hal tersebut bertentangan dengan keinginan *muwakkil*.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji hanya milik Allah yang telah memecahkan sumber-sumber hikmah dari hati orang-orang yang benar. Penulis bersyukur kepada Allah dan memohon ampunan dari segala dosa dan semua amal. Shalawat dan salam kepada Nabi dan hamba-Nya yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, keturunan dan juga semua orang yang mencintainya. Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) jurusan Muamalah UIN-SU Medan dengan judul Hukum Terhadap Hadiah Yang Tidak Diberikan atas Pembelian Detergen Dengan Skema Akad Wakalah Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area Kotamadya Medan).

Proses penyelesaian skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat taufik dan hidayah dan izin-Nya, beserta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan meskipun terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun tata bahasanya.

Semoga skripsi ini mampu membawa manfaat kepada para pembaca dan dapat menjadi khazanah ilmu sebagai penambah referensi khususnya bagi Jurusan.

Keberhasilan penulis tak luput atas dukungan orang-orang hebat dan terdekat. Untuk dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terutama dan teristimewa Ayah tersayang Samsul Tua Siregar dan Mama tercinta Masnila Pane atas segenap kasih dan sayang, limpahan doa yang tiada hentinya, didikan dan dukungan baik moral maupun materiil, yang telah diberikan kepada penulis yang tidak akan tergantikan oleh apapun selain bakti dan doa, karya kecil ini penulis jadikan sebagai persembahan untuk kedua orang tua. Terima kasih juga untuk Abang saya (Azwan Siregar dan Azwin Siregar) yang telah banyak mendukung saya memberikan semangat kepada saya. Begitu juga terimah kasihku untuk saudara- saudaraku yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang selalu mendoakan saya agar dapat cepat menyelesaikan skripsi ini;

2. Bapak Rektor yaitu Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para Wakil Rektor;
3. Bapak Dekan yaitu Dr. Zulham, S.HI M.Hum selaku pimpinan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU;
4. Bunda Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Tetty Marlina Tarigan, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan Muamalah, yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan;
5. Ibu Dr. Nurcahaya M.Ag (Pembimbing I) yang telah sabar dalam membimbing penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan skripsi ini;
6. Ibu Annisa Sativa M.Hum (Pembimbing II) yang telah mengarahkan dan memberi saran juga selalu memotivasi saya untuk menulis dengan baik dan benar dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Dra. Laila Rohani M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan;

8. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staf Pegawai Prodi Muamalah yang telah mengajarkan ilmu yang begitu bermanfaat bagi penulis;
9. Sahabatku yang paling tiada duanya Dyah Puspita Ningrum, Annisa Ramadhani Saragih, dan Intan Annisa Putri Waluyo yang memberikan semangat dan doa dalam menyelesaikan skripsi semoga sukses dan selalu di lindungi Allah SWT;
10. Sahabatku tersayang seperjuangan Putri Ayu Ramjani, Lulu Elvirayani, dan Feby Tri Tania yang menjadi teman diskusi dan menyemangati penulis dalam penyelesaian skripsi ini semoga sukses dan selalu di lindungi Allah SWT;
11. Keluarga Besar Muamalah stambuk 2015.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun pembacanya.

Medan, Juli 2020

Penulis

ASTRI MAYSARAH SIREGAR

24.15.3.069

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	13
G. Hipotesis.....	15
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Hadiah	
1. Pengertian Hadiah.....	21
2. Dasar Hukum Hadiah.....	26
3. Rukun dan Syarat Hadiah.....	27

B. Tinjauan Umum Tentang Wakalah	
1. Definisi Wakalah.....	29
2. Dasar Hukum Wakalah.	32
3. Rukun dan Syarat Wakalah.....	35
4. Macam-Macam Wakalah.	40
5. Berakhirnya Wakalah.	43

BAB III SKEMA PENYERAHAN HADIAH ATAS PEMBELIAN DETERGEN DAIA DI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Pasar Tradisional Sukaramai Kecamatan	
Medan Area Kotamadya Medan.	44
B. Lokasi Pasar Sukaramai Kecamatan	
Medan Area Kotamadya Medan.	46
C. Skema Penyerahan Hadiah atas Pembelian Detergen	
Daia di Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area	
Kotamadya Medan.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Imam Syafi'i dan Madzhabnya.	51
B. Bentuk Kasus.	58
C. Hukum Terhadap Hadiah yang Tidak Diberikan	
Atas Pembelian Detergen Daia Perspektif	
Mazhab Syafi'i.....	68
D. Analisis Penulis.	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.	84
B. Saran.	86

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku / Kitab.	89
B. Website	92

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu yang diatur oleh agama Islam adalah persoalan *Muamalah*, *Muamalah* adalah hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain, atau antara individu dengan negara Islam, atau hubungan negara Islam dengan negara lain. Seluruh aturan ini bertujuan menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudharatan yang akan terjadi atau akan menimpa mereka.¹

Ruang lingkup *Muamalah* dalam kegiatan ekonomi ialah *ijab qabul*, saling meridhai, tidak adanya keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera yang berkaitan dengan peredaran harta dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam bermuamalah manusia tidak mampu untuk mengerjakan segala urusannya secara pribadi. Dalam Islam mensyaratkan *wakalah* karena

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.6.

manusia membutuhkannya. sehingga beliau butuh pendelegasian mandat kepada orang lain untuk dapat melakukannya sebagai *wakil* darinya.

Secara Terminologis Menurut Mazhab Syafi'i *Wakalah* ialah,

وشرعاً : تَفْوِضُ شَخْصٍ مَا لَهُ فِعْلُهُ مِمَّا يَقْبَلُ النَّيَابَةَ إِلَى غَيْرِهِ لِيَفْعَلَهُ فِي حَيَاتِهِ²

Artinya: “*Wakalah* adalah pemberian *tafwidh* (wewenang) oleh seseorang

atas apa yang berhak dilakukannya dan boleh diwakilkan kepada orang lain, agar dilaksanakan pada masa hidupnya.”

Dari pendapat Mazhab Syafi'i maka dapat disimpulkan bahwa *wakalah* adalah suatu akad dimana pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua untuk melakukan suatu perbuatan yang bisa digantikan oleh orang lain pada masa hidupnya dengan syarat-syarat tertentu. Apabila penyerahan tersebut harus dilakukan setelah orang yang mewakilkan meninggalkan dunia, seperti wasiat, maka hal itu tidak termasuk wakalah.³

Allah SWT Berfirman di dalam Alquran ketika menceritakan tentang Ashabul Kahfi, Q.S Al-Kahfi: 19

² Syamsuddin Muhammad ibn Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Jilid 2, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1997), h.281.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.418.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: “Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, Sudah berapa lama kamu berada (di sini)? Mereka menjawab, Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari. Berkata (yang lain lagi), Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke Kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawa lah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun”⁴.

Ijma ulama membolehkan *wakalah* karena *wakalah* dipandang sebagai bentuk tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa yang diperintahkan oleh Allah SWT⁵ Akad *Wakalah* adalah bersifat amanah. Penerima kuasa (*al-wakil*) adalah orang yang bisa menjaga amanah yang diberikan oleh pemberi kuasa (*al-muwakkil*) . ini berarti bahwa *Al-wakil* tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang di luar batas, kecuali karena kesengajaannya.⁶ Orang yang mewakili harus jujur terhadap apapun yang diwakilkan. Apabila yang

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), h.236.

⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.211.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), h.234.

diwakilkan itu rusak dengan sendirinya, bukan karena kelalaian atau usahanya (orang yang mewakili), beliau tidak menanggungnya, akan tetapi kalau kerusakan itu karenanya maka beliau harus bertanggung jawab atas kerusakannya.⁷

Di era modern, strategi pemasaran terhadap barang-barang dagangan yang dijual oleh para pedagang agar menarik para calon konsumen untuk membeli produk-produk yang dipasarkan adalah dengan memberikan iming-iming hadiah kepada para calon konsumen. Para pedagang memanfaatkan pemberian hadiah untuk menarik konsumen sebanyak mungkin agar keuntungan yang diperoleh semakin besar. Strategi pemasaran seperti ini dilakukan oleh PT. Wings Surya, salah satunya ada pada produk detergen Daia. Pelaksanaan pemberian hadiah pembelian detergen Daia tersebut berawal dari Produsen yang memberikan kuasa kepada Agen untuk memberikan hadiah piring tersebut kepada penjual, pihak grosir, ataupun toko-toko di pasar tradisional yang membeli produk detergen Daia berukuran 900 (sembilan ratus) gram. Kemudian pihak penjual akan menyampaikan

⁷ Moh. Rifa'i, Moh. Salomo, *Terjemah Khulasah : Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV Toha Pustaka, 1987), h.278.

hadiah piring tersebut kepada pembeli atau konsumen yang membeli Daia berukuran 900 (sembilan ratus) gram.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Agen, bukti penyerahan hadiah piring Daia dari pihak Produsen kepada Pihak Agen adalah dalam bentuk perkataan/lisan dalam sebuah kalimat seperti “hadiah piring ini untuk diserahkan kepada pelaku usaha/penjual detergen Daia dan kemudian wakikan lagi kepada pelaku usaha/penjual detergen Daia untuk menyerahkan hadiah piring ini pada konsumen”, lalu langsung diserahkan produk beserta hadiah piring tersebut karena piring tersebut merupakan kelengkapan dari produk detergen Daia dan pada kemasan Daia berukuran 900 (sembilan ratus) gram sudah tertera “gratis 1 piring” jadi konsumen berhak meminta.⁸ Sehingga dapat disimpulkan pihak produsen bertindak sebagai *muwakkil* dengan memberikan kuasa kepada agen sebagai *wakil pertama* untuk menyerahkan hadiah piring (*muwakkil fih*) kepada penjual, pihak grosir ataupun toko-toko tradisional sebagai *wakil kedua* dan kemudian agen mewakikan kembali kepada penjual, pihak grosir ataupun toko-toko

⁸ Pak Arie, (Agen), Wawancara Pribadi, Pasar Sukaramai Kota Medan, tanggal 13 Maret 2020 pukul 11.40 WIB.

tradisional untuk memberikan hadiah piring kepada pembeli detergen Daia berukuran 900 (sembilan ratus) gram.

Wakalah terbagi menjadi beberapa macam, Salah satunya adalah *Wakalah Muqayyadah* yang dipraktekkan dalam pemberian hadiah atas pembelian detergen di Pasar Sukaramai. *Wakalah Muqayyadah* adalah *wakalah* dimana *muwakkil* membatasi tindakan *wakil* dan menentukan cara melaksanakan tindakan tersebut. Misalnya, “aku wakulkan padamu untuk menjual rumahku ini dengan harga sekian”. Maka *wakil* dapat menjualnya dengan harga yang layak dan tidak terbatas dengan hari tertentu. Jika perwakilan bersifat terikat, *wakil* berkewajiban mengikuti apa saja yang telah di tentukan oleh orang yang mewakilkan. Ia tidak boleh menyalahinya kecuali kepada yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang yang mewakilkan bila yang mewakili menyalahi aturan-aturan yang telah disepakati ketika akad, penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang mewakilkan, maka tindakan tersebut batal menurut pandangan Imam Syafi’i. Sedangkan menurut mazhab Hanafi tindakan itu tergantung para kerelaan orang yang

mewakikan. Jika yang mewakikan membolehkannya, maka penjualananya menjadi sah, bila tidak meridhainya maka menjadi batal.⁹

Dalam ketentuan yang terdapat pada akad Wakalah Muqayyadah, Hukumnya, seorang *wakil* terikat, dengan apa yang ditentukan oleh *muwakkil*, artinya beliau mesti memerhatikan kaitan-kaitan atau syarat-syarat yang diberikan *muwakkil* sebisa mungkin, baik yang berhubungan dengan pihak pengakad, dengan objek akad, atau dengan alternatif yang diakadkan.¹⁰ dalam pelaksanaan pemberian hadiah atas pembelian detergen menggunakan skema akad wakalah muqayyadah pihak pengakad nya sudah ditentukan oleh muwakkil (produsen) dimana agen sebagai *wakil* pertama dan penjual detergen Daia sebagai *wakil* kedua dan Pembeli sebagai orang yang menerima objek *wakalah*. Dan objek akadnya adalah hadiah piring untuk pembelian detergen Daia berukuran 900 (sembilan ratus) gram.

Ketika *muwakkil* mengutuskan wakilnya untuk memberikan hadiah atas pembelian detergen Daia berukuran 900 (sembilan ratus) gram, penulis menemukan beberapa *Wakil* bermain curang ataupun melakukan penipuan

⁹ Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.139.

¹⁰Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004),h. 155.

dengan tidak memberikan hadiah piring kepada konsumen sehingga muwakkil dan pihak konsumen dirugikan.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan penulis, penulis mewawancarai salah satu penjual detergen Daia berukuran 900 (sembilan ratus) gram dan beliau mengatakan: “saya terkadang tidak memberikan hadiah piring Daia karena kadang stoknya saya pakai sendiri atau saya jual untuk mendapatkan untung dan agar tidak memakan tempat di toko karena stok barang penjualan saya banyak.”¹¹

Dari penelitian awal dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa *wakil* yang tidak amanah dalam menyampaikan objek yang diwakilkan dan jika dikaitkan dengan pendapat Mazhab Syafi’i adalah transaksinya menjadi batal. Pendapat mazhab Syafi’i tersebut terdapat pada kitab al- Fiqhu asy-Syafi’iyu al- Muyassar , sebagai berikut:

ومتى خالف الوكيل الموكل في بيع ماله، أو الشراء بعين ماله فيما لم يأذن له فيه، فتصرفه باطل، لمخالفة إرادة الموكل.¹²

Artinya: Bila wakil tidak menaati pewakil dalam penjualan harta, atau membeli dengan harta pewakil barang yang tidak pewakil izinkan

¹¹ Pak Ucok, (Penjual), Wawancara Pribadi, Pasar Sukaramai Kota Medan, 18 Oktober 2019 pukul 15.30 WIB.

¹² Wahbah az-Zuhaili, al- Fiqhu asy-Syafi’iyu al- Muyassar, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), h.635.

maka transaksinya batal. Karena hal tersebut bertentangan dengan keinginan pewakil.

Berangkat dari permasalahan ini kemudian penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“HUKUM TERHADAP HADIAH YANG TIDAK DIBERIKAN ATAS PEMBELIAN DETERGEN DENGAN SKEMA AKAD WAKALAH PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I (STUDI KASUS DI PASAR SUKARAMAI KECAMATAN MEDAN AREA KOTAMADYA MEDAN)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Tinjauan Umum tentang Hadiah dan Akad *Wakalah*?
2. Bagaimanakah Skema Penyerahan Hadiah atas Pembelian Detergen Daia di Lokasi Penelitian?
3. Bagaimanakah Hukum terhadap Wakil yang tidak memberikan Hadiah atas Pembelian Detergen Daia Menurut Mazhab Syafi’i?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas ialah:

1. Untuk mengetahui tinjauan umum mengenai Hadiah dan Akad *Wakalah*;
2. Untuk mengetahui Skema Penyerahan Hadiah atas Pembelian Detergen Daia di di Lokasi Penelitian;
3. Untuk mengetahui Hukum terhadap Wakil yang tidak memberikan Hadiah atas Pembelian Detergen Daia Menurut Mazhab Syafi'i;

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan akad *wakalah muqayyadah* dan penerapannya dalam penyerahan hadiah atas pembelian detergen yang merupakan bagian dari transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang berpengaruh pada aspek perdagangan khususnya dalam hal kejujuran antara pelaku usaha dengan produsen dan konsumen. Bagi akademik, dapat digunakan sebagai sarana

untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak yang terkait dengan pembelian berhadiah dan akad *wakalah* yang sesuai dengan hukum Islam. Bagi penulis, untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU).

E. Kajian Pustaka

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak karya tulis yang membahas permasalahan yang sama. Setelah penulis mengadakan pencarian literatur, penulis menemukan beberapa judul yang berkaitan dengan Hukum terhadap hadiah yang tidak diberikan atas pembelian detergen dengan skema akad *wakalah* perspektif Mazhab Syafi'i, diantaranya adalah

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Munira Ulfa Syafwar, “Perjanjian Penerima Kuasa (Al-Wakil) Untuk Membeli barang terhadap dirinya sendiri Menurut Imam Syafi'i”, skripsi ini membahas tentang seseorang yang telah

dijadikan wakil untuk menjualkan barang milik muwakkil maka wakil tidak boleh membeli barang tersebut untuk dirinya sendiri.¹³

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Wasita Lianasari, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Piring Bonus di Toko Nurul Ilmu Maumere Nusa Tenggara Timur”, skripsi ini membahas tentang penjualan piring bonus yang dilakukan oleh toko Nurul Ilmu dimana status piring tersebut adalah piring bonus dan dalam jual beli terdapat salah satu syarat barang yang dijual harus milik pembeli, sedangkan pada prakteknya piring tersebut milik konsumen yang berhak diterima saat membeli produk bertuliskan hadiah dari perusahaan. sehingga jual beli tersebut berubah menjadi jual beli batal.¹⁴

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Hanifah, “*Wakalah* dalam kontrak Jual Beli Menurut Imam Syafi’i”, skripsi ini membahas tentang konsep *wakalah* dalam jual beli dan pendapat Imam Syafi’i tentang *wakalah* dalam kontrak jual beli.¹⁵

¹³ Munira Ulfa Syafwar, Perjanjian Penerima Kuasa (Al-Wakil) Untuk Membeli barang terhadap dirinya sendiri Menurut Imam Syafi’i, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2018).

¹⁴ Wasita Lianasari, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Piring Bonus di Toko Nurul Ilmu Maumere Nusa Tenggara Timur*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016).

¹⁵ Hanifah, *Wakalah Dalam Kontrak Jual Beli Menurut Imam Syafi’i*, (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2017).

Penelitian ini berbeda dari skripsi-skripsi yang penulis paparkan di atas. Dimana di dalam penelitian ini penulis membahas mengenai wakil yang tidak amanah dalam menyampaikan objek yang diwakilkan. Sementara terdapat persamaan dari skripsi-skripsi di atas yaitu pada skripsi pertama, sama-sama membahas mengenai wakil yang melakukan penipuan kepada muwakkil, kedua sama-sama membahas hadiah pada produk detergen dan pada skripsi ketiga, sama-sama membahas akad *wakalah*.

F. Kerangka Teoretis

Wakalah secara terminologis yaitu mewakilkan yang dilakukan orang yang punya hak *tasharruf* kepada orang lain juga memiliki *tasharruf* tentang sesuatu yang boleh diwakilkan.¹⁶ *Wakalah* pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan karena *wakalah* dipandang sebagai bentuk tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa.

Di era modern, strategi pemasaran terhadap barang-barang dagangan yang dijual oleh para pedagang agar menarik para calon konsumen untuk membeli produk-produk yang dipasarkan adalah dengan memberikan iming-iming hadiah kepada para calon konsumen. Strategi pemasaran seperti ini

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.300.

dilakukan oleh PT. Wings Surya, salah satunya ada pada produk detergen Daia. Pelaksanaan pemberian hadiah atas pembelian detergen Daia tersebut menggunakan akad *wakalah muqayyadah* yaitu berawal dari Produsen (*muwakkil*) yang memberikan kuasa kepada Agen (wakil pertama) untuk memberikan hadiah piring tersebut kepada penjual, pihak grosir, ataupun toko-toko di pasar tradisional (wakil kedua) yang membeli produk detergen Daia berukuran 900 (sembilan ratus) gram. Kemudian pihak penjual akan menyampaikan hadiah piring tersebut kepada pembeli atau konsumen yang membeli Daia berukuran 900 (sembilan ratus) gram.

Wakalah Muqayyadah adalah *wakalah* dimana *muwakkil* membatasi tindakan *wakil* dan menentukan cara melaksanakan tindakan tersebut. Jika perwakilan bersifat terikat, *wakil* berkewajiban mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan. Ia tidak boleh menyalahinya kecuali kepada yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang yang mewakilkan bila yang mewakili menyalahi aturan-aturan yang telah disepakati ketika akad, penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang mewakilkan, maka tindakan tersebut batal menurut pandangan Imam Syafi'i.

G. Hipotesis

Dari uraian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan penyerahan hadiah atas pembelian detergen di Pasar Sukaramai kecamatan medan area Kotamadya medan belum sesuai dengan Pendapat Mazhab Syafi'i, karena terdapat beberapa pelaku usaha yang tidak amanah dan tidak memenuhi ketentuan dari muwakkil sehingga transaksinya menjadi batal karena hal tersebut bertentangan dengan keinginan muwakkil.

H. Metode Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman cara kerja penelitian skripsi ini, maka penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁷ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h.126.

dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁸

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *conceptual and case approach*. Salah satu fungsi logis dari pendekatan konsep ialah memunculkan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan. Penggabungan ini memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran.

Pendekatan kasus tujuannya adalah untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum. Kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang telah terjadi dalam bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari, untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.15.

dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*in put*) dalam eksplanasi hukum.¹⁹

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area Kotamadya Medan.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis melakukan prosedur pengumpulan bahan hukum untuk menindaklanjuti dalam memperoleh data, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Sutrisno dalam hal ini mengungkapkan dalam bukunya metodologi research, menggunakan bahwa interview adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.²⁰

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h.135

²⁰ Sutrisno Hadi, *"Metodologi Research"*, Jilid II, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h.193.

1) Informan

Dalam penelitian ini informan yang ditentukan adalah:

- a) Penjual Detergen Daia;
- b) Agen Produk Detergen Daia;
- c) Masyarakat;
- d) Ulama;

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Kegiatan analisis kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti ketiga tahapan tersebut sebagai sesuatu yang merupakan proses siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan mengenai landasan teori yaitu Tinjauan Umum tentang Hadiah dan Akad *Wakalah* yang terdiri dari Pengertian Hadiah, Dasar Hukum Hadiah, Rukun dan Syarat Hadiah. serta tinjauan umum mengenai akad wakalah yang terdiri dari Definisi *wakalah*, Dasar hukum *wakalah*, Rukun dan Syarat akad *wakalah*, Macam- macam *wakalah* dan Berakhirnya *wakalah*.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang Skema Penyerahan Hadiah atas Pembelian Detergen Daia di Lokasi Penelitian yang terdiri dari Sejarah Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area Kotamadya medan, Lokasi Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area Kotamadya Medan, dan Skema

Penyerahan Hadiah atas Pembelian Detergen Daia di Pasar Sukaramai
Kecamatan Medan Area Kotamadya Medan.

Bab keempat merupakan pembahasan tentang Hasil Penelitian yang terdiri dari Sejarah Singkat Imam Syafi'i dan Madzhabnya, Bentuk Kasus, Hukum terhadap Hadiah yang Tidak Diberikan Atas Pembelian Detergen Daia Perspektif Mazhab Syafi'i, serta Analisis penulis.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Hadiah

1. Pengertian Hadiah

Hadiah berasal dari kata *Hadi* (هادی) terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *ha'*, *dal*, dan *ya*. Maknanya berkisar pada dua hal. Pertama, tampil ke depan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata Hadi yang bermakna penunjuk jalan, karena dia tampil di depan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata hidayah (هداية) yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati.²³

Hadiah juga sering disebut *hibah*. Ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dari macam-macam *hibah*. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, hadiah dikategorikan dalam bentuk *hibah*.²² Sedangkan menurut

²¹ Sahabuddin et al., *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 261

²² Abdul Azizi Dahlan, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 540.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).

Menurut istilah fikih, hadiah didefinisikan sebagai berikut:

a. Menurut Zakariyya Al- Anshari

(أَلْهَدِيَّةٌ وَهِيَ) تَمْلِكُ (مَا يُحْمَلُ) أَيُّ يُبْعَثُ (غَالِيًا) بِلاَ عَوَضٍ إِلَى الْمُهْدَى إِلَيْهِ (إِكْرَامًا)²³

Artinya: Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.”

b. Menurut Sayyid Sabiq

أَلْهَدِيَّةٌ كَالْهَبِيَّةِ حُكْمًا وَمَعْنَى²⁴

Artinya: Hadiah itu seperti *hibah* dalam segi hukum dan maknanya.

Dalam pengertian ini, Sayyid Sabiq tidak membedakan antara hadiah dengan *hibah* dalam segi hukum dan segi makna. *Hibah* dan hadiah adalah dua istilah dengan 1 (satu) hukum dan 1 (satu) makna. Sehingga ketentuan yang berlaku bagi *hibah* berlaku juga bagi hadiah.

²³ Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy- Syafi'i, *Asnal Mathalib*, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiya, juz 5), h.566.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Mesir: Dar al-Fath li al- l'ami al- Arabiy, juz 3), h.315.

Imam an-Nawawi mengatakan:²⁵ Imam Syafi'i membagi *tabarru'at* (pemberian) seseorang kepada yang lain menjadi 2 (dua) bagian: yang dikaitkan dengan kematian dan itu adalah wasiat; yang dilakukan saat masih hidup. Pemberian saat masih hidup ini ada dua bentuk yaitu murni pemindahan pemilikan seperti hibah, sedekah dan wakaf. Yang murni pemindahan pemilikan itu ada 3 (tiga) macam yaitu hibah, sedekah sunah dan hadiah. jalan untuk menentukannya adalah kita katakan pemindahan pemilikan tanpa kompensasi (*tamlik bi la iwadh*), jika ditambah (adanya) pemindahan sesuatu yang dihibahkan dari suatu tempat ke tempat orang yang diberi hibah (dimana pemberian itu) sebagai penghormatan (*ikraman*) maka itu adalah hadiah. jika ditambah bahwa pemindahan pemilikan itu ditujukan kepada orang yang membutuhkan, sebagai suatu *taqarrub* kepada Allah SWT dan untuk meraih pahala akhirat maka itu adalah sedekah.

Perbedaan hadiah dan hibah adalah dipindahkannya sesuatu yang dihibahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Karena itu, lafadz hadiah tidak bisa digunakan dalam hal property. Dengan demikian, tidak dikatakan, "Saya menghadiahkan rumah atau tanah". Akan tetapi, hadiah itu digunakan dalam

²⁵ An-Nawawi, *Rawdhah ath-Thalibin*, (Mesir: al-Maktabah at-Taufiqiyah), h.421.

hal harta bergerak yang bisa dipindah-pindahkan seperti pakaian dan hamba sahaya. Jadi semua hadiah dan sedekah merupakan hibah, tetapi tidak sebaliknya.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hadiah adalah pemberian harta kepada seseorang untuk memuliakannya tanpa adanya paksaan dari keduanya.

Pemberian hadiah itu umumnya adalah untuk memuliakan penerima. Pemberian hadiah banyak mekanismenya. Dan pemberian hadiah juga bisa diwakilkan kepada orang lain jikalau berhalangan ataupun tidak mampu untuk memberikan sendiri secara langsung. Bahkan Islam menganjurkan agar saling memberikan hadiah supaya tercipta rasa kasih sayang di antara mereka. Tentunya pemberian hadiah yang dapat memupuk rasa kasih sayang itu merupakan pemberian hadiah yang muncul dari hati nurani yang tulus dan ikhlas, hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah.

Hadiah bisa dikategorikan menjadi dua yaitu: *Pertama*, hadiah yang berupa pemberian terhadap seseorang karena prestasinya atau memang murni karena penghormatan. Tidak ada tujuan lain selain penghormatan tersebut. *Kedua*, hadiah yang diberikan kepada seseorang karena punya

maksud tertentu baik untuk kepentingan dirinya ataupun kepentingan orang lain.

Untuk kategori pertama jelas bahwa orang yang memberi itu ikhlas dan ini bisa dibenarkan jika orang yang diberi hadiah itu benar-benar berprestasi atau orang yang memberikan hadiah itu termasuk orang biasa yang tidak mempunyai kepentingan dan kedudukan dalam sebuah lembaga atau organisasi. Sebab bagi orang yang mempunyai jabatan, maka akan rawan sekali untuk melakukan lobi-lobi yang tidak adil dengan memakai sarana hadiah. Kalau tidak hati-hati akan terjebak *risywah* (suap).²⁶ Di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan sebab keharaman hadiah bagi pekerja maupun pejabat, dan bahwa hadiah tersebut itu diberikan karena faktor kewenangan. Berbeda dengan hadiah untuk selain pekerja yang justru disunnahkan.²⁷

Pemberian hadiah juga biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk menarik minat konsumen membeli produk mereka sehingga tingkat pendapatan perusahaan meningkat dan dapat disimpulkan pemberian dengan cara ini diperbolehkan karena tidak ada unsur yang dilarang syara'. Strategi pemasaran dengan memberikan hadiah juga dilakukan oleh

²⁶ Abu Yasid, *Fiqh Realitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 81.

²⁷ Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi, Terj. Misbah, "Syarah Shahih Muslim"*, Jilid 12, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h.568.

Perusahaan Wings, dimana pemberian hadiah tersebut ada pada produk detergen Daia. Setiap konsumen yang membeli detergen Daia berukuran 900 (sembilan ratus) gram akan mendapatkan 1 (satu) buah piring kaca , dan pada kemasan Daia berukuran 900 (sembilan ratus) gram tercantum “Gratis 1 (satu) buah piring cantik”.

2. Dasar Hukum Hadiah

a. Dasar Hukum yang bersumber dari Al-qur'an

Dalam surah an-Nisa'[4]:4 Allah berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”²⁸

b. Dasar Hukum yang bersumber dari Hadis

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : تهادوا تهابوا. (رواه البخاري في الأدب المفرد، وأبو يعلى با

سناد حسن)²⁹.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.100.

²⁹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram*, Terj. Muhammad Isnani, “Subulus Salam”- Syarah Bulughul Maram”, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), h.555.

Artinya: “Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda, “Hendaklah kalian saling memberi hadiah, agar kalian saling mencintai.” (HR. Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan Abu Ya’la dengan sanad hasan)

3. Rukun dan Syarat Hadiah

Hadiah sebagai sebuah akad, memiliki 3 (tiga) rukun beserta syarat yang harus dipenuhi yaitu: *Pertama*, adanya *al-aqidan*, yaitu pihak pemberi hadiah (*al-muhdi*) dan pihak yang diberi hadiah (*al-muhda ilayh*). *Al-Muhdi* haruslah orang yang layak melakukan *tasharruf*, pemilik harta yang dihadiahkan dan tidak dipaksa. *Al-Muhda ilayh* disyaratkan harus benar-benar ada saat akad. Ia tidak harus orang yang layak melakukan *tasharruf* saat akad hadiah itu. Jika *al-muhda ilayh* masih kecil atau gila maka penerimaan hadiah diwakili oleh wali atau *mushi*-nya.

Kedua, adanya ijab dan qabul. Hanya saja, dalam hal ini tidak harus dalam bentuk redaksi (*shighat*) *lafzhiyah*. Hal itu karena pada masa Nabi SAW hadiah dikirimkan kepada Beliau dan Beliau menerimanya, juga Beliau mengirimkan hadiah tanpa redaksi *lafzhiyah*. Fakta seperti itu menjadi fakta umum pada masa itu dan setelahnya.

Ketiga, harta yang dihadiahkan (*al-muhda*). *Al-Muhda* (barang yang dihadiahkan) disyaratkan harus jelas (*ma’lum*), harus milik *al-muhdi* (pemberi

hadiah), halal diperjualbelikan dan berada di tangan *al-muhdi* atau bisa ia serah terimakan saat akad. Menurut Imam Syafi'i dan banyak ulama Syafi'iyah, barang itu haruslah barang bergerak, yaitu harus bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal itu karena seperti itulah yang berlangsung pada masa Nabi SAW disamping tidak ada riwayat yang menjelaskan adanya hadiah berupa rumah dan tanah itu pada masa Nabi SAW dan para Sahabat.

Di samping ketiga rukun itu ada syarat yang harus terpenuhi sehingga hadiah itu sempurna, yaitu harus ada *al-qabdh* (serah terima), yakni secara real harus ada penyerahan *al-muhda* kepada *al-muhda ilayh*. Jika tidak ada ijab qabul secara lafzhiyah maka adanya *al-qabdh* ini sudah dianggap cukup menunjukkan adanya pemindahan pemilihan itu. Penyerahan harta itu dianggap merupakan ijab dan penerimaan hadiah oleh *al-muhda ilayh* merupakan qabulnya. Untuk barang yang standarnya dengan dihitung, ditakar atau ditimbang (*al-ma'dud wa al-makil wa al-mawzun*) maka zat barang itu sendiri yang harus diserahterimakan. Adapun harta selain *al-ma'dud wa al-makil wa al-mawzun* seperti pakaian, hewan, kendaraan, dan barang elektronik maka yang penting ada penyerahan kepemilikan atas barang

itu kepada *al-muhda ilayh* dan *qabdh*-nya cukup dengan menggesernya atau jika hewan dengan melangkahnnya, atau semisalnya.³⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Wakalah

1. Definisi Wakalah

Wakalah atau *wikalah* merupakan isim masdar yang secara etimologis bermakna *taukil*, yaitu menyerahkan, mewakilkan, dan menjaga.³¹ Terkadang diartikan memelihara, sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S Ali-Imran:173

الَّذِينَ قَالُوا هُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

Artinya:“(Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, Orang-orang (Quraisy) telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka, ternyata (ucapan) itu menambah (kuat) iman mereka dan mereka menjawab, Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung.”³²

³⁰ http://eprints.walisongo.ac.id/3781/3/102311034_Bab2.pdf di akses pada hari Kamis tanggal 20 februari 2020 pukul 11.38

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h.300.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.57.

Maksudnya sebaik-baik pemelihara, dan terkadang diartikan menyerahkan,³³

sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Ibrahim: 12

وَمَا لَنَا إِلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدانا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَىٰ ثُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

الْمُتَوَكِّلُونَ

Artinya: “Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh, akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang yang bertawakal berserah diri.”³⁴

Menurut Terminologis terdapat beberapa pengertian *Wakalah* yang dikemukakan oleh fuqaha, sebagai berikut.

a. Menurut Syamsuddin Muhammad bin Khatib Al-Syarbini

وشرعاً : تَفْوِضُ شَخْصٍ مَا لَهُ فِعْلُهُ بِمَا يَقْبَلُ النَّيَابَةَ إِلَى غَيْرِهِ لِيَفْعَلَهُ فِي حَيَاتِهِ³⁵

Artinya: “*Wakalah* adalah pemberian *tafwidh* (wewenang) oleh seseorang atas apa yang berhak dilakukannya dan boleh diwakilkan kepada orang lain, agar dilaksanakan pada masa hidupnya.”

³³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Juz IV, h. 150.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.205.

³⁵ Syamsuddin Muhammad bin Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Jilid 2, h.281.

b. Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari

وَهِيَ تَقْوِيضُ شَخْصٍ أَمْرُهُ إِلَى آخَرَ فِيمَا يَقْبَلُ النَّيَا بَةً لِيَفْعَلَهُ فِي حَيَاتِهِ³⁶

Artinya: “*Wakalah* adalah penyerahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam urusan yang dapat digantikan, agar orang tersebut melaksanakannya selagi penyerah masih hidup.”

c. Menurut Hasbi Ash- Shiddieqy

عَقْدٌ تَقْوِيضٌ يُنْيَبُ فِيهِ شَخْصٌ شَخْصًا آخَرَ عَنْ نَفْسِهِ³⁷

Artinya: “Aqad penyerahan kekuasaan, yang pada aqad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (bertasharuf)”.

Kalangan Hanafiyyah mendefinisikan *Wakalah* dengan, “Seseorang menunjuk orang lain untuk berada di posisinya dalam melakukan *tasharruf* yang boleh dan jelas,” atau, “Menyerahkan *tasharruf* dan pemeliharaan kepada *wakil*.” Sementara, kalangan Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanabilah mendefinisikannya dengan, “Penyerahan seseorang terhadap sesuatu yang ia berhak melakukannya di mana sesuatu itu termasuk perbuatan yang bisa

³⁶ Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari, *Fat-hul Mu’in*, (Beirut: Ibn Hazm, 2004), h. 359.

³⁷ Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: 1972), h.103.

diwakilkan dalam melakukannya kepada orang lain untuk dilakukan ketika ia hidup.” Batasan sesuatu yang bisa diwakilkan itu adalah setiap *tasharruf* yang boleh dilakukan seseorang secara sendiri meskipun secara prinsip ia boleh mewakilkan orang lain melakukannya.³⁸

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *al-wakalah* adalah penyerahan hak kuasa dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dan perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.

2. Dasar Hukum Wakalah

Wakalah adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diridhai oleh Allah SWT *Wakalah* disyariatkan dan hukumnya adalah boleh. Ini berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas.

a. Dasar Hukum yang bersumber dari Al-qur'an

Allah SWT Berfirman di dalam Alquran ketika menceritakan tentang Ashabul Kahfi, Q.S Al-Kahfi: 19:

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, jilid IV, h. 150.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ

أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ

مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: “Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, Sudah berapa lama kamu berada (di sini)? Mereka menjawab, Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari. Berkata (yang lain lagi), Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun”.³⁹

Tolong menolong diserukan oleh Al-Qur'an terdapat dalam Firman

Allah: Q.S. Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁴⁰

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.236.

⁴⁰ *Ibid.*, h.85.

b. Dasar Hukum yang bersumber dari Hadis

Hadis yang diriwayatkan oleh Malik dalam al- Muwaththa':

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ

(رواه مالك في الموطأ)⁴¹

Artinya: “Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mengawinkan (kabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a.” (HR. Malik dalam al- Muwaththa’).

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan *had* dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, dan membagi kandang hewan.

عَنْ بُشَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ ابْنَ السَّعْدِيِّ الْمَالِكِيَّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا

وَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ أُمْرِي بِعَمَالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ: فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيتَ، فَإِنَّ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ

⁴¹ Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, jilid 1, (Beirut: dar al-tarats al-'arabi, 1985), h. 348.

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلَنِي، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

وَسَلَّمَ: إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ. متفق عليه⁴²

Artinya: “Diriwayatkan dari Busr bin Sa’id bahwa Ibn Sa’diy al-Maliki berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang kamu beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekalah.” (Muttafaq ‘alaih)

3. Rukun dan Syarat Wakalah

a. Rukun *Wakalah*

Rukun *Wakalah* ada 4 (empat) yaitu *Muwakkil* (pihak yang mewakilkan), *wakil* (penerima kuasa), *muwakkal fih* (perkara yang diwakilkan), dan *Shigat* (ijab dan qabul). *Wakalah* tidak sah, kecuali dengan keberadaan ijab; yaitu pernyataan kerelaan dari *muwakkil* yang sah pinangan langsungnya dalam mentasarufkan *muwakkal fiih* (perkara yang diwakilkan). Misalnya “Aku mewakilkan kepadamu dalam masalah ini/Aku menyerakan masalah ini kepadamu/Kamu kujadikan sebagai penggantikmu dalam masalah

⁴² Muttafaq ‘alaih Al- Syaukani, *Nail al-Autar*, juz 4 (Kairo: Dar al- Hadis, 2000), h. 527.

ini/Jualkan barang ini dengan harga sekian/Kawinkanlah wanita Fulanah/Talakkanlah ia/Engkau kuberi kekuasaan atas talaknya/Merdekan Fulan”.

As-Subki berkata: Dari pembicaraan para ulama, dapatlah diketahui bahwa perkataan seorang wanita yang tidak mempunyai wali, “Kuizinkan kepada siapa saja dalam daerah ini yang akan mengawinanku” adalah sah. Al-Adzra’i berkata: itu dihukumi sah, jika si wanita tersebut telah menentukan calon suaminya dan tidak menyerahkan kecuali hanya shigatnya saja. Atas pendapat Al-Adzra’i diatas, Ibnush Shalah berfatwa. Dalam *wakalah* tidak disyaratkan ada qabul secara lisan (ucapan), namun disyaratkan tidak ada penolakan sama sekali.⁴³

b. Syarat – syarat *Wakalah*

Untuk sahnya sebuah *wakalah*, ada beberapa syarat untuk *muwakkil*, *wakil* dan objek yang diwakilkan. Tentang *muwakkil*, beliau disyaratkan adalah *malik* (pemilik) bagi *tasharruf* yang diwakilkan, artinya beliau memiliki hak dan *ahliyyah* untuk langsung melakukannya, karena orang yang tidak memiliki sebuah *tasharruf* tentu tidak bisa memberikan kepemilikannya

⁴³ Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari, *Fat-hul Mu'in*, h. 299.

kepada orang lain. Maka, tidak sah sama sekali *taukil* (perwakilan) dari orang yang tidak memiliki *ahliyyah* seperti orang gila atau anak kecil yang tidak *mumayyiz* dalam *tasharruf* yang akan bermudharat padanya seperti talak dan *hibah*. Syafi'iyah berpendapat, tidak sah perwakilan dari anak kecil sama sekali, karena mereka tidak untuk melakukan jenis *tasharruf* apa pun.

Untuk *wakil*, seorang anak kecil tidak sah karena beliau belum dibebani dengan hukum-hukum syariat sehingga beliau tidak bisa melakukan *tasharruf* secara langsung, dan dengan demikian beliau juga tidak sah menjadi *wakil* dari orang lain. Orang yang gila, idiot, dan belum *mumayyiz* tidak sah dijadikan sebagai *wakil* untuk berbagai *tasharruf*. Demikian juga tidak boleh menjadi wakil perempuan dan orang yang sedang ihram dalam pernikahan.⁴⁴

penerima kuasa (*al-wakil*) adalah orang yang bisa menjaga amanah yang diberikan oleh pemberi kuasa (*al-muwakkil*) . ini berarti bahwa *Al-wakil* tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang di luar batas, kecuali karena kesengajaannya.

Mengenai objek yang akan diwakilkan, syaratnya adalah:

⁴⁴ Syamsuddin Muhammad bin Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Jilid 2, h.233.

- 1) Milik *muwakkil*. Objek yang diwakilkan adalah harus milik si *muwakkil*.⁴⁵
- 2) Jelas bagi si *wakil*. Batal *wakalah* pada perkara (*muwakkil fihi*) yang tidak diketahui. Misalnya, “Aku mewakilkan kepadamu pada perkara yang sedikit dan yang banyak/pada setiap perkaraku”, atau “Tasarufkanlah sekehendakmu pada perkara-perkaraku, karena besar kesamaran dalam perkataan tersebut;
- 3) *Tasharruf* yang diwakilkan itu dibolehkan secara syariat. Maka, tidak boleh melakukan *taukil* (pewakilan) dalam melakukan sesuatu yang haram secara syariat seperti merampas atau menzalimi orang lain. Tidak sah mewakilkan penjualan barang yang akan menjadi miliknya;
- 4) Sesuatu yang diwakilkan itu bisa diwakilkan, *wakalah* sah dilakukan untuk setiap akad, misalnya: Jual beli, nikah, hibah, gadai dan cerai yang jelas sasarannya. Sah pula dilakukan pada setiap *fasakh* (penggagalan), misalnya kegagalan jual beli dan mengembalikan barang sebab cacat. Sah pula dilakukan pada penerimaan/menerimaan utang/barang.⁴⁶ Ada yang tidak bisa

⁴⁵ *Ibid.*, h.235.

⁴⁶ Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari, *Fat-hul Mu'in*, h. 296.

diwakilkan sama sekali dengan kesepakatan para ulama seperti sumpah, ibadah pribadi yang ritual seperti shalat, puasa, dan suci dari hadats;

Wakalah dengan menggantungkan *pentasharrufannya* saja adalah sah, misalnya, “Juallah barang ini, tetapi setelah satu bulan nanti.” Juga sah dengan membatasi masa berlakunya: misalnya, “Aku mewakilkan kepadamu sampai bulan Ramadhan.” Dalam *wakalah* disyaratkan keadaan *muwakkil fih* diketahui oleh *wakil*, sekalipun hanya dari satu sisi; misalnya, “Aku mewakilkan kepadamu untuk menjual seluruh hartaku dan memerdekakan budak-budakku”, sekalipun harta dan budak-budaknya belum diketahui, karena kecilnya penipuan yang ada dalam perkataan tersebut. Lain halnya dengan: “Jualkanlah ini atau itu”; Ini berbeda dengan “Jualkanlah salah seorang dari kedua budakku”, sebab pengertian “salah seorang” itu bisa diterapkan pada mana saja budak yang dimilikinya. Lain lagi (tidak sah) dengan: “Jualkanlah sebagian hartaku”. Tetapi *wakalah* sah dengan: “Jualkanlah atau hibahkanlah dari hartaku, terserah padamu”.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.*, h. 301.

4. Macam – macam Wakalah

Wakalah ada beberapa macam, di antaranya: *Pertama*, *wakalah* khusus dan umum. Boleh jadi *wakalah* itu bersifat khusus dan boleh jadi juga bersifat umum. *Wakalah* khusus adalah mewakilkan pada seseorang dalam *tasharruf* tertentu seperti menjual tanah atau mobil tertentu, menyewa sebuah ‘aqar yang ditentukan, dan *taukil* dalam kasus tertentu. Hukumnya, *wakil* terikat dengan apa yang telah diwakilkan padanya, kalau tidak beliau termasuk seorang yang *fudhuli* (melakukan sesuatu di luar batas kewenangannya).

Wakalah umum adalah perwakilan yang bersifat umum untuk setiap *tasharruf* atau apa saja, seperti, “Engkau adalah wakilku dalam setiap bentuk *tasharruf*”, atau, “.... dalam apa saja”, atau, “Belikan untukku apa saja yang engkau mau atau apa pun menurutmu.” Hukumnya, *wakil* berhak melakukan perwakilan dalam hal tersebut selain *tasharruf* yang bermudharat pada *muwakkil* seperti berbagai bentuk sumbangan baik *hibah*, dan wakaf. Seorang *wakil* tidak memiliki hak untuk menghibahkan harta si *muwakkil* kecuali ada keterangan atau penjelasan yang tegas untuk itu.⁴⁸

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, jilid IV, h. 155.

Kedua, wakalah muqayyadah dan muthlaqah. Boleh jadi *wakalah* bersifat *muqayyadah* (terikat) atau *muthlaqah* (lepas). *Wakalah muqayyadah* *wakalah* dimana *muwakkil* membatasi tindakan *wakil* dan menentukan cara melaksanakan tindakan tersebut. Misalnya, “aku wakikan padamu untuk menjual rumahku ini dengan harga sekian”. Maka *wakil* dapat menjualnya dengan harga yang layak dan tidak terbatas dengan hari tertentu. Jika perwakilan bersifat terikat, *wakil* berkewajiban mengikuti apa saja yang telah di tentukan oleh orang yang mewakilkan. Ia tidak boleh menyalahinya kecuali kepada yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang yang mewakilkan bila yang mewakili menyalahi aturan-aturan yang telah disepakati ketika akad, penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang mewakilkan, maka tindakan tersebut batal menurut pandangan Imam Syafi’i. Sedangkan menurut mazhab Hanafi tindakan itu tergantung para kerelaan orang yang mewakilkan. Jika yang mewakilkan membolehkannya, maka penjualannya menjadi sah, bila tidak meridhainya maka menjadi batal.

Hukumnya, seorang *wakil* terikat, dengan apa yang ditentukan oleh *muwakkil*, artinya beliau mesti memerhatikan kaitan-kaitan atau syarat-syarat

yang diberikan *muwakkil* sebisa mungkin, baik yang berhubungan dengan pihak pengakad, dengan objek akad, atau dengan alternatif yang diakadkan.

Wakalah muthlaqah adalah *wakalah* yang terbebas dari setiap batasan.

Misalnya, “Aku wakilkan padamu untuk menjual rumahku”. Kemudian ada seseorang mewakilkan orang lain untuk menjual sesuatu tanpa ada ikatan harga tertentu, pembayaran kontan atau diangsur, di kampung atau di kota, maka yang terbebas dari setiap batasan. Misalnya, “Aku wakilkan padamu untuk menjual rumahku”. Maka wakil dapat menjualnya dengan harga layak dan tidak terbatas dengan harga tertentu ia wakikan (orang yang mewakili) tidak boleh menjualnya dengan seenaknya saja. Imam Syafi’i berpendapat bahwa wakil tersebut boleh menjual sebagaimana kehendak wakil itu sendiri. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak saling menukar.”⁴⁹

⁴⁹ Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, h.139.

5. Berakhirnya Wakalah

Transaksi *wakalah* dinyatakan berakhir atau tidak dapat dilanjutkan dikarenakan oleh salah satu sebab diantaranya:

- a. Matinya salah seorang dari yang berakad.
- b. Bila salah satunya gila.
- c. Pekerjaan yang dimaksud dihentikan.
- d. Pemutusan oleh *muwakkil* terhadap *wakil* meskipun *wakil* tidak mengetahui (menurut Syafi'i dan Hambali) tetapi menurut Hanafi *wakil* wajib tahu sebelum ia tahu maka tindakannya seperti sebelum ada putusan.
- e. *Wakil* memutuskan sendiri.
- f. Keluarnya orang yang mewakilkan (*muwakkil* dari status kepemilikan).⁵⁰

⁵⁰ Moh. Anwar, *Fiqh Islam: mu'amalah, munakahat, faro'id dan jinayah*, (Bandung: P.T. Al-Ma'arif, 1979), h. 190.

BAB III

SKEMA PENYERAHAN HADIAH ATAS PEMBELIAN DETERGEN DAIA DI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Pasar Tradisional Sukaramai Kecamatan Medan Area Kotamadya Medan

Pasar Tradisional Sukaramai terletak di Kecamatan Medan Area, tepatnya di persimpangan antara jalan Arief Rahman Hakim dengan jalan Sutrisno. Pada tahun 1998 Pasar Tradisional Sukaramai resmi berdiri dan dikelola langsung oleh Pemerintah atau Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Medan saat itu. Sebelumnya pasar ini hanya terdiri dari tenda-tenda yang tidak beraturan. Pesatnya perkembangan Pasar Tradisional Sukaramai saat itu, Pemerintah memutuskan untuk mengelola secara lebih baik.

Pada bulan Oktober 2010, bangunan 3 (tiga) lantai ini mengalami musibah kebakaran dan rusak berat, sehingga tidak layak pakai sebagai tempat proses berdagang. Kondisi ini memaksa pedagang yang ada di pasar

Sukaramai untuk menempati penampungan sementara yang disediakan Pemerintah untuk berjualan.

Pada kawasan Pasar Tradisional Sukaramai terdapat aktivitas pendukung. Adapun bentuk aktivitas pendukung yang terjadi di kawasan tersebut antara lain aktivitas pendukung ruang terbuka yaitu adanya pedagang kaki lima, jalur pedestrian, pedagang asongan, dan aktivitas ruang tertutup yaitu pertokoan, pusat jasa dan kantor. Berdasarkan perancangan Kotamadya tanda umum dibuat untuk menertibkan dan mengurangi ketidakteraturan, seperti rambu-rambu lalu lintas. Pada persimpangan Pasar Tradisional Sukaramai terdapat tanda umum diantaranya rambu dilarang berhenti 50 (lima puluh) meter kedepan, dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang namun peraturan tersebut tidak dipatuhi sehingga menyebabkan kemacetan.

Pasar Sukaramai memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Fasilitas pelayanan: pertokoan, perpasaran, kantor-kantor pelayanan umum dari *civic center*⁵¹;

⁵¹ Civic Center atau Pusat Kegiatan Warga adalah sebuah ruang publik yang dapat menjadi tempat bagi warga masyarakat untuk berkumpul dan beraktivitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial atau kultural.

- b. Populasi pelayanan: 20.000 (dua puluh ribu) -70.000 (tujuh puluh ribu) jiwa;
- c. Skala radius pelayanan: 0 (nol) -1,5 (satu koma lima) km;
- d. Perkiraan kepadatan: 80 (delapan puluh) -100 (seratus) ha;
- e. Status pasar Kecamatan;

B. Lokasi Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area Kotamadya Medan

Pasar Sukaramai berada di titik koordinat 3°34.9698°44.36. Pasar Sukaramai merupakan kawasan pemukiman penduduk sehingga pasar Sukaramai memiliki pelanggan tetap yang ada di sekitarnya. Lokasi *site*⁵² yang terletak di pusat Kotamadya sehingga mudah untuk di akses oleh masyarakat ramai. Dilalui oleh jalan Arief Rahman Hakim dan jalan Sutrisno yang dilalui oleh banyak angkutan umum, sehingga mudah dicapai oleh masyarakat.

Kawasan pasar Sukaramai ini mempunyai Luas lahan 2.316,34 (dua koma tiga) Ha, Dekat dengan pemukiman penduduk, sehingga target pasar dapat dengan mudah terpenuhi, karena tersedianya jumlah pembeli yang memadai.

⁵² Site adalah semua sifat atau karakter internal dari suatu daerah tertentu.

Berdasarkan hasil survey dan data yang ada, maka dapat diperoleh data potensi kios dan basement yang buka dan tutup yang ada di kawasan pasar Sukaramai untuk tahun buku 2020, antara lain:

No	Lantai	Potensi		Aktif		Cabut	
		Kios	Stand	Kios	Stand	Kios	Stand
01	I	196	-	196	-	-	-
02	II	233	-	220	-	13	-
03	Basement	233	-	233	-	-	-
04	Jumlah	662	-	649	-	13	-

Keterangan : - Kios Lantai I & II yang aktif berjualan : $30 + 13 = 43$ unit

- Lantai Basement yang aktif berjualan : 70 unit

Pasar Jalan Dahlia

Jumlah Pedagang : 25 Pedagang

Pasar Ramai Utama

Jumlah Pedagang : 180 Pedagang

C. Skema Penyerahan Hadiah atas Pembelian Detergen Daia di Pasar

Sukaramai Kecamatan Medan Area Kotamadya Medan

Jual beli adalah suatu kegiatan perekonomian yang dihalalkan (diperbolehkan) oleh syariat Islam. Suatu transaksi perdagangan dinilai sah dan halal jika memenuhi rukun dan syarat jual beli. Di era modern seperti sekarang strategi pemasaran kerap dilakukan oleh pedagang untuk menarik calon konsumen salah satunya adalah dengan memberikan hadiah atas pembelian suatu produk. Cara pembagian hadiah pun dibuat beraneka ragam seperti beli satu dapat dua, diskon harga di setiap musim tertentu, *door prize*, undian berhadiah, *puzzle* potongan gambar yang dikumpulkan dari barang yang dibeli, hadiah tunai dalam setiap kemasan, dan sebagainya.

Mekanisme pemberian hadiah seperti ini bisa diberikan secara langsung oleh pedagang ataupun melalui orang lain dengan cara diwakilkan. Dalam muamalah perwakilan disebut dengan *wakalah*. *al-wakalah* adalah penyerahan hak kuasa dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dan perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.

Imam Syafi'i berkata apabila seseorang mewakilkan suatu urusan kepada orang lain, maka tidak boleh bagi *wakil* untuk mewakilkan urusan itu

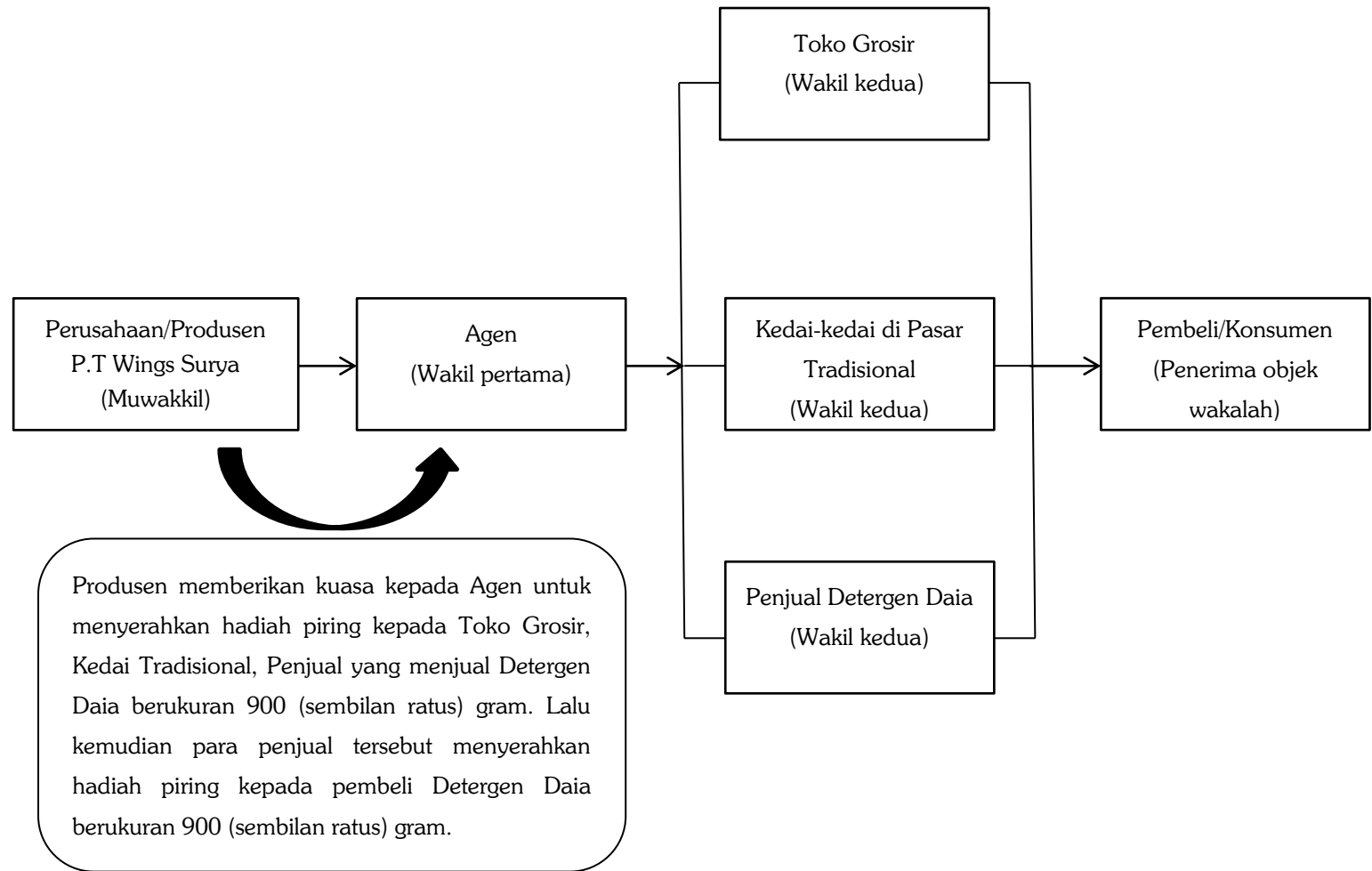
kepada orang lain lagi, baik keadaan *wakil* sedang sakit atau hendak bepergian jauh, ataupun ia tidak ridha menjadi *wakil*. Sebab, orang yang menunjuknya menjadi *wakil* ridha dengannya dan belum tentu ridha bila diwakili oleh orang lain. Apabila orang yang mewakilkan urusannya berkata kepada wakilnya “Engkau boleh mewakilkan urusan ini kepada siapa saja yang engkau anggap tepat”, maka si *wakil* dapat mewakilkannya disertai keridhaan dari orang yang mewakilkan. Seorang *wakil* tidak memiliki kewenangan selain pada apa yang diwakilkan kepadanya. Begitu pula seseorang tidak dapat menjadi *wakil* hingga dijelaskan jenis perwakilannya, apakah dalam hal jual beli, titipan, peradilan, pembangunan atau selain itu.⁵³

Dalam penyerahan hadiah atas pembelian detergen Daia menggunakan akad *wakalah muqayyadah*. dalam akad *wakalah muqayyadah wakil* mesti memerhatikan kaitan-kaitan atau syarat-syarat yang diberikan *muwakkil* sebisa mungkin, baik yang berhubungan dengan pihak pengakad, dengan objek akad, atau dengan alternatif yang diakadkan. Dan dalam penyerahannya muwakkil menentukan wakil-wakilnya untuk memberikan

⁵³ Muhammad bin Idris Asy Syafi’i, *Al Umm, Jilid II*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2002),h.489.

hadiah tersebut dan menentukan spesifikasi Daia yang mendapatkan hadiah

tersebut. Skema penyerahannya adalah sebagai berikut:



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Imam Syafi'i dan Madzhabnya

Pendiri Madzhab Asy-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al-Muthalibi, garis keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dari kakeknya Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam yaitu Abdumanaf. Imam Asy-Syafi'i dilahirkan di Gaza pada tahun 150 H, lalu dibawa pindah oleh ibunya ke Makkah untuk mengaji pada Muslim bin Khalid az-Zanji seorang Mufti Makkah, dan para ulama Makkah lainnya. Beliau mempelajari bahasa Arab Fushah dari suku Arab asli penutur bahasa Arab yang tidak tercampur dengan lahn dan bahasa asing lainnya. Karena pergaulan dengan suku Hudzail, Imam Asy-Syafi'i memiliki kemampuan bahasa yang baik sehingga bisa memahami Al-Quran dan Hadits Nabi dengan baik.

Pada tahun 189 H Imam Asy-Syafi'i berpindah ke Makkah lagi dari Baghdad setelah wafatnya guru beliau yang bernama Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syibani. Pada tahun 195 H setelah selama 6 (enam) tahun

mengajar di Makkah, Imam Asy-Syafi'i kembali lagi ke Baghdad. Dimulailah penulisan madzhab Asy-Syafi'i baik pokok dan cabangnya serta dikemukakan kepada masyarakat setelah menyatakan keluar dari Madzhab Al-Maliki. Unsur penting dalam kepergian beliau ke Baghdad ini adalah penulisan 2 (dua) buku yaitu Ar-Risalah (edisi awal) tentang Ushul Fiqih dan Al-Hujjah dalam Fiqih. Di Baghdad inilah beliau menyusun Al-Hujjah yang berisi tentang madzhabnya yang lama.

Imam Asy-Syafi'i dianggap sebagai seorang Mujtahid di abad ke 2 (dua) Hijriah. Karena beliau menyatukan Ilmu Hadits dan Ilmu Akal serta menyusun kaidah-kaidah Ushul Fiqih. Selain daripada itu juga beliau menguasai ilmu tentang hadits beserta riwayat dan orang yang meriwayatkannya. Juga ilmu Al-Quran, ilmu Sejarah, ilmu Sastra dan Bahasa Arab. Beliau wara', taqwa dan zuhud atas kenikmatan dunia.

Imam Asy-Syafi'i meninggal di Kairo pada tahun 204 H. Karya Imam Asy-Syafi'i terbagi menjadi dua, yaitu karya yang hilang ditelan zaman dan karya yang masih bisa dibaca sampai sekarang. Karya yang hilang adalah: Al-Hujjah tentang Fiqih, Ar-Risalah (edisi Iraq/edisi lama) tentang ushul Fiqih, Al-Mabsuth tentang Fiqih, dan As-Sunan dengan riwayat Harmalah At-Tujibi

tentang hadits. Sedangkan karya beliau yang ada sampai sekarang adalah: Al-Um tentang Fiqih, Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila tentang Fiqih, Ikhtilaf Ali wa Abdillah Ibn Mas'ud tentang Fiqih, Ikhtilaf Malik wa Asy-Syafi'i tentang Fiqih, Ar-Rad 'ala Muhammad bin Al-Hasan tentang Fiqih, Sair Al-Awza'i tentang Fiqih, Ar-Risalah (edisi Mesir/edisi baru) tentang Ushul Fiqih, Ibtal Al-Istihsan tentang Ushul Fiqih, Jima' Al-'Ilm tentang Ushul Fiqih, Bayan Fara'idillah tentang Fiqih, Shifat Nahy An-Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang Ushul Fiqih, dan Ikhtilaf Al-Hadits tentang hadits.

Madzhab Asy-Syafi'i

Madzhab Asy-Syafi'i merupakan salah satu dari 4 (empat) Madzhab fiqih di golongan Ahlussunnah wal Jama'ah; yaitu Madzhab Al-Maliki, Mazhab Al-Hanafi Madzhab Asy-Syafi'i dan Madzhab Al-Hanbali. Sedangkan yang dimaksud dengan madzhab adalah: kumpulan pendapat, pandangan ilmiah dan pandangan filsafat yang saling berkaitan antara satu dan yang lainnya, yang menjadi satu kesatuan yang terorganisir. Imam Asy-Syafi'i mengurutkan sumber ijtihad atau dalil-dalil hukum ke dalam lima peringkat:

1) Al-Quran dan As-Sunnah. Keduanya menempati peringkat yang sama, karena As-Sunnah adalah penjelasan bagi Al-Quran dan sekaligus menjadi perinci (mufashshil) bagi ayat-ayat Al-Quran yang lebih bersifat umum (mujmal). Hadits yang sejajar dengan Al-Quran adalah hadits yang shahih.

2) Ijma' Ulama terhadap hukum-hukum yang tidak terdapat penjelasannya di dalam Al-Quran atau hadits. Yang dimaksud dengan ijma' disini adalah ijma' para ahli fiqih yang menguasai ilmu khusus (fiqih) dan sekaligus menguasai beberapa ilmu umum. Jumhur ulama memberikan pengertian bahwa ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Muhammad setelah wafatnya sang nabi pada masa tertentu terhadap sebuah hukum syariat;

3) Pendapat para Shahabat Nabi dengan syarat tidak ada yang menentang pendapat tersebut, dan juga tidak melanggar ucapan Shahabat lain;

4) Pendapat para Shahabat yang paling mendekati ketetapan Al-Quran, Hadits atau qiyas (analogi) ketika terjadi perbedaan pendapat di antara mereka;

5) Qiyas terhadap sebuah perkara yang berketetapan hukum dalam Al-Quran, Hadits atau Ijma' (konsensus). Qiyas adalah menganalogikan sesuatu yang tidak terdapat dalam nash untuk menghasilkan hukum syariat dengan sesuatu yang hukumnya sudah terdapat dalam nash disebabkan adanya persamaan antara kedua hal tersebut dari segi ilat (sebab) hukum. Imam Asy-Syafi'i menolak penggunaan istihsan, masalah mursalah, sad adz-dzara'i dan syariat kaum-kaum terdahulu untuk dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan hukum syariat Islam.

Sejarah tentang perkembangan Madzhab Asy-Syafi'i bisa diringkas menjadi 5 (lima) fase:

- 1) Pendirian Madzhab; fase ini berakhir dengan wafatnya Imam Asy-Syafi'i yang meninggalkan karyanya berupa Al-Um.
- 2) Regenerasi; para murid dan sahabat Imam Asy-Syafi'i mulai menyebarkan Madzhab Asy-Syafi'i. Karya dalam Madzhab Asy-Syafi'i yang paling masyhur dalam fase ini adalah Mukhtashar karya Imam Al-Muzanni.

3) Penulisan cabang-cabang Fiqih dalam Madzhab serta perluasan pembahasan Fiqih dalam berbagai masalah. Pada fase ini dikenal dua Metode Madzhab Asy-Syafi'i, yaitu Metode Iraq dan Metode Khurasan.

4) Editorisasi; dipelopori oleh 2 (dua) orang Syaikh Madzhab yaitu Ar-Rafi'i dan An-Nawawi dalam buku-bukunya. Mereka berdua melakukan editorisasi atas berbagai permasalahan dalam Madzhab beserta dalil-dalinya, juga melakukan pemilahan antar riwayat madzhab dan pendapat-pendapatnya.

5) Kemapanan; Dipelopori oleh Ibn Hajar Al-Haitami dan Asy-Syam Ar-Ramli dengan melakukan editorisasi hal yang belum dibahas oleh Imam Rafi'i dan Imam An-Nawawi atas pendapat-pendapat dalam Madzhab beserta riwayatnya, dan juga melakukan penemuan-penemuan hukum dari sisa cabang-cabang madzhab dan masalah masalah lainnya. Kitab-kitab Madzhab Asy-Syafi'i yang paling terkenal adalah: Al-Um karya Imam Asy-Syafi'i, Al-Hawi Al-Kabir karya Al-Mawardi, Al-Muhadzdzab karya Asy-Syairazi, Al-Wasith karya Al-Ghazali, Al-Majmu' karya An-Nawawi, Minhaj Ath-Thalibin wa 'Umdah Al-Muftin karya An-Nawawi, Al-Iqna' fi Hilli Alfazh Matn Abi Syuja' karya Asy-Syarbini, Minhaj Ath-Thulab karya Zakariyya Al-Anshari, Hasyiyah Asy-Syarqawi 'ala Thuhfah Ath-Thulab karya Zakariyya Al-Anshari,

Hasyiyah Al-Bajuri karya Ibrahim Al-Bajuri, Al-Mizan Al-Kubra karya Asy-Sya'rani, Hasyiyah An-Nabawi 'ala Syarh Al-Khatib, Al-Asybah wa An-Nazhair karya As-Suyuthi, Raudlah Ath-Thalibin karya An-Nawawi, Al-Fatawa Al-Kubra karya Ibn Hajar Al-Haitami dan Kifayah Al-Akhyar karya Al-Hishni Ad-Dimasqi.

Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith menjelaskan bahwa keutamaan Madzhab Asy-Syafi'i daripada Madzhab lainnya adalah:

- 1) Pendiri Madzhab memperhatikan dalil atau argumen madzhabnya berdasarkan Al-Quran, Hadits dan pendapat Shahabat dengan berguru kepada Malik bin Anas (Imam Malik);
- 2) Pendiri Madzhab memperhatikan jenis-jenis qiyas (analogi) dan asas-asas pengambilan dalil seperti yang dikuasi oleh Abu Hanifah (Imam Al-Hanafi);
- 3) Madzhab penengah antara golongan hadits/tekstual (Madzhab Imam Al-Malik) dan golongan rasio (Madzhab Imam Al-Hanafi);
- 4) Banyaknya mujtahid dari para ulama yang berkhidmah kepada Madzhab Asy-Syafi'i dengan menyebarkannya ke setiap penjuru dunia;

- 5) Banyaknya literatur yang telah disusun oleh ulama dalam penelitian Madzhab dan penggalian dalilnya, serta melakukan penyederhanaan agar mudah dipahami oleh murid-muridnya pada tiap abad setiap masa;
- 6) Banyaknya penganut Madzhab Asy-Syafi'i di setiap tempat. Mereka tersebar di Indonesia, Malaysia, Asia Kecil, Persia, Iraq, Syam (Levanth), Hijaz (Makah, Madinah dan Jeddah), Yaman, Mesir dan pesisir Afrika Timur;
- 7) Pembaharu Islam pada setiap masa merupakan penganut Madzhab Asy-Syafi'i.⁵⁴

B. Bentuk Kasus

Pemberian Hadiah piring di Pasar Sukaramai terjadi setiap adanya pembelian detergen Daia berukuran 900 (sembilan ratus) gram . Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Agen, bukti penyerahan hadiah piring Daia dari pihak Produsen kepada Pihak Agen adalah dalam bentuk perkataan/lisan dalam sebuah kalimat seperti “hadiah piring ini untuk diserahkan kepada pelaku usaha/penjual detergen Daia dan kemudian wakikan lagi kepada pelaku usaha/penjual detergen Daia untuk

⁵⁴https://www.academia.edu/9252482/SEJARAH_SINGKAT_IMAM_ASY-SYAFI_I_DAN_MADZHABNYA di akses pada hari jum'at tanggal 12 Juni 2020 pukul 18.13

menyerahkan hadiah piring ini pada konsumen”, lalu langsung diserahkan produk beserta hadiah piring tersebut karena piring tersebut merupakan kelengkapan dari produk detergen Daia dan pada kemasan Daia berukuran 900 (sembilan ratus) gram sudah tertera “gratis 1 piring” jadi konsumen berhak meminta.⁵⁵ Sehingga dapat disimpulkan pihak produsen bertindak sebagai *muwakkil* dengan memberikan kuasa kepada agen sebagai *wakil pertama* untuk menyerahkan hadiah piring (*muwakkil fih*) kepada penjual, pihak grosir ataupun toko-toko tradisional sebagai *wakil kedua* dan kemudian agen mewakilkan kembali kepada penjual, pihak grosir ataupun toko-toko tradisional untuk memberikan hadiah piring kepada pembeli detergen Daia berukuran 900 (sembilan ratus) gram. Dalam mekanisme pemberian hadiah piring tersebut dapat penulis simpulkan antara Produsen kepada Agen dan pelaku usaha menggunakan akad *wakalah muqayyadah*.

Wakalah muqayyadah adalah *wakalah* dimana *tasharruf* seorang *wakil* terikat dengan syarat-syarat tertentu. Hukumnya, seorang *wakil* terikat, dengan apa yang ditentukan oleh *muwakkil*, artinya beliau mesti memerhatikan kaitan-kaitan atau syarat-syarat yang diberikan *muwakkil*

⁵⁵ Pak Arie, (Agen), Wawancara Pribadi, Pasar Sukaramai Kota Medan, tanggal 13 Maret 2020 pukul 11.40 WIB.

sebisa mungkin, baik yang berhubungan dengan pihak pengakad, dengan objek akad, atau dengan alternatif yang diakadkan.

Tetapi dalam penelitian yang dilakukan penulis *wakil* yang seharusnya menyampaikan amanah perusahaan berupa hadiah piring yang akan diberikan setiap pembelian detergen Daia ukuran 900 (sembilan ratus) gram masih ada yang tidak terlaksana dikarenakan pelaku usaha tidak memberikan hadiah piring tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode wawancara penulis mewawancarai 10 (sepuluh) orang penjual detergen Daia yang berada di Pasar Sukaramai di jalan Arief Rahman Hakim Medan. Berikut adalah alasan yang menyebabkan penjual tidak memberikan hadiah piring detergen Daia di pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area Kotamadya Medan:

- a. Hadiah piring dimanfaatkan untuk kebutuhan diri sendiri

Menurut penjual yang penulis wawancara, bahwa alasan mereka tidak memberikan hadiah piring kepada konsumen karena stok hadiah piring mereka pakai untuk kebutuhan diri sendiri, berikut adalah pernyataan mereka:

“Saya terkadang tidak memberikan hadiah piring Daia karena kadang stoknya saya pakai sendiri atau saya jual untuk mendapatkan untung dan agar tidak memakan tempat di toko karena stok barang penjualan saya banyak.”⁵⁶

b. Hadiah piring dijual

Menurut penjual yang penulis wawancara, bahwa alasan mereka tidak memberikan hadiah piring kepada konsumen karena stok hadiah piring mereka jual kepada penjual nasi disekitar pasar dan kepada ibu-ibu yang memang butuh untuk keperluan rumah atau hajatan sehingga sering stok piring yang seharusnya diberikan kepada konsumen habis. berikut adalah pernyataan mereka:

“Hadiah piring untuk detergen Daia yang ukuran 900 (sembilan ratus) gram itu terkadang saya jual saja ke orang-orang yang mau, kadang ke ibu-ibu yang mau wirid sama penjual sarapan pagi, saya jual Rp 2000 (dua ribu rupiah) satu tapi kalau ditawar jadi Rp 1000 (seribu rupiah) ya tidak apa-apa”⁵⁷

“Hadiah piring detergen Daia yang ukuran 900 (sembilan ratus) gram kadang saya jual juga, karena kan ada yang mau beli ibu-ibu biasanya.

⁵⁶ Pak Ucok, (Penjual), Wawancara Pribadi, Pasar Sukaramai Kota Medan, 18 Oktober 2019 pukul 15.30 WIB.

⁵⁷ Ibu Nita, (Penjual), Wawancara Pribadi, Pasar Sukaramai Kota Medan, tanggal 10 Januari 2020 pukul 16.02 WIB.

Malah mereka itu belinya perlusin, saya jual harganya Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perlusin. Stoknya ya kadang berkurang jadi kalau ada konsumen Daia yang beli ukuran 900 (sembilan ratus) gram gak kedapatan piring saya bilang saja habis dan kadang ada juga pembeli yang minta hadiahnya ditukar jadi shampo atau sabun cuci piring”⁵⁸

“Produk Daia itu kan memang dapat hadiah piring kaca yang kecil itu, kadang kan hadiah nya itu buat nyemak di toko saya terus rentan pecah jadi saya jual saja sama ibu-ibu yang mau, palingan saya jual 1000 atau 2000 per biji. Tapi kadang ada juga ibu-ibu yang minta langsung piringnya karena tau dia ada hadiahnya, karena saya jual-jual piringnya itu jadi ibu-ibu yang minta hadiah piringnya kadang-kadang gak kedapatan.”⁵⁹

c. Pembeli tidak mau menerima hadiah piring atas pembelian detergen

Daia 900 (sembilan ratus) gram

Menurut penjual yang penulis wawancara, bahwa alasan mereka tidak memberikan hadiah piring kepada konsumen karena pembeli yang tidak mau menerima hadiah piring atas pembelian detergen Daia 900 (sembilan ratus) gram, berikut adalah pernyataan mereka:

⁵⁸ Bapak Ikram, (Penjual), Wawancara Pribadi, Pasar Sukaramai Kota Medan, tanggal 14 Januari 2020 pukul 15.47 WIB.

⁵⁹ Ibu Jomet, (Penjual), Wawancara Pribadi, Pasar Sukaramai Kota Medan, tanggal 12 Juni 2020 pukul 15.45 WIB.

“Kadang-kadang ada juga pembeli yang tidak mau hadiah piring detergen Daia itu alasannya karena piringnya mudah pecah (tidak bagus) atau piringnya sudah banyak dan pembeli tersebut meminta potong harga misalnya harga detergen Daia Rp 17.000 (tujuh belas ribu rupiah) dipotong seribu jadi Rp 16.000 (enam belas ribu rupiah)”.⁶⁰

d. Penjual lupa memberikan hadiah piring atas pembelian detergen

Daia 900 (sembilan ratus) gram

Menurut penjual yang penulis wawancara, bahwa alasan mereka tidak memberikan hadiah piring kepada konsumen karena penjual lupa memberikan hadiah piring tersebut, berikut adalah pernyataan mereka:

*“Kadang saya lupa kasih hadiah piring sama konsumen yang beli detergen Daia 900 (sembilan ratus) gram karena mungkin saat itu pas pembeli lagi banyak dan kadang saya mau cepat juga.”*⁶¹

Dari hasil wawancara penulis dapat disimpulkan terdapat 1 (satu) orang penjual yang memanfaatkan objek yang diwakilkan untuk kebutuhannya sendiri dan sekaligus menjualnya, terdapat 1 (satu) orang penjual yang memanfaatkan objek yang diwakilkan untuk kebutuhannya sendiri, terdapat 5 (lima) orang penjual yang langsung menjual objek yang diwakilkan,

⁶⁰ Bapak Samsul, (Penjual), Wawancara Pribadi, Pasar Sukaramai Kota Medan, tanggal 10 Januari 2020 pukul 15.56 WIB.

⁶¹ Bapak Akmal, (Penjual), Wawancara Pribadi, Pasar Sukaramai Kota Medan, tanggal 14 Januari 2020 pukul 15.38 WIB.

terdapat 1 (satu) orang penjual yang mengatakan pembeli tidak mau menerima hadiah piring, dan terdapat 2 (dua) orang penjual yang lupa memberikan objek yang diwakilkan. Dan 10 (sepuluh) orang pelaku usaha yang penulis wawancarai masih belum bisa menyampaikan amanah *muwakkil* di Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area Kotamadya Medan.

Adapun berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, terdapat penjual yang merasa keberatan karena adanya pemberian hadiah kepada konsumen, berikut pernyataannya:

*“Menurut saya dengan adanya sistem hadiah dari produsen seperti ini agak memberatkan. Karena ini kan amanah yang harus disampaikan penjual, jika saya sedang tidak ada ditempat dan saya wakikan kepada suami saya itu tidak tersampaikan karena suami saya tidak tahu produk mana saja yang ada hadiahnya. Biasanya saya yang lebih tahu karena suami saya jarang di warung. Jika tidak diberikan berarti amanah nya tidak disampaikan dan jelas berdosa. Karena sebagai penjual , banyak yang harus diurus seperti barang baru masuk dan lain-lain bukan hanya hadiah ini saja”.*⁶²

Menurut penulis jika ada penjual yang merasa bahwa sistem pemberian hadiah ini merupakan beban bagi mereka hendaknya penjual membatasi

⁶² Ibu Ika, (Penjual), Wawancara Pribadi, Pasar Sukaramai Kota Medan, tanggal 14 Januari 2020 pukul 09.30 WIB.

penjualan produk berhadiah, dan bagi perusahaan atau produsen hendaknya mencari solusi lain untuk meningkatkan strategi penjualan produk mereka. penerima kuasa (*al-wakil*) adalah orang yang bisa menjaga amanah yang diberikan oleh pemberi kuasa (*al-muwakkil*). Secara umum, menurut semua ulama adalah wajib baginya (orang yang dititipi) untuk menjaga barang titipan sesuai dengan kebiasaan orang-orang dalam menjaga harta mereka.⁶³

Program promosi yang diterapkan oleh Perusahaan Wings untuk meningkatkan penjualan dengan memberikan hadiah piring kepada konsumen cukup membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan seperti menambah stok piring di rumah yang nantinya akan digunakan dalam keperluan sehari-hari, acara syukuran, hajatan, dan berjualan. Bahkan terdapat beberapa konsumen yang meminta penambahan piring kepada penjual 2 (dua) sampai 3 (tiga) karena ia membutuhkannya.⁶⁴

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan metode wawancara, penulis mengambil informan dari masyarakat atas pandangan mereka terhadap *wakil* yang tidak amanah dalam menyampaikan

⁶³ Ibnu Rusyd, Edisi Indonesia: *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), h.585.

⁶⁴ Ibu Evi, (Penjual), Wawancara Pribadi, Pasar Sukaramai Kota Medan, tanggal 14 Januari 2020 pukul 15.25 WIB.

hadiah atas pembelian detergen di Pasar Sukaramai. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada 7 (tujuh) orang masyarakat terdapat 4 (empat) orang masyarakat yang pernah tidak diberikan hadiah piring detergen oleh penjual. empat orang masyarakat yang tidak diberikan hadiah piring tersebut menyatakan kurang mengetahui kejelasan hukum dari wakil yang tidak memberikan hadiah pembelian detergen, tetapi mereka mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan penjual adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' dan merugikan konsumen. berikut pernyataan pandangannya:

“ Menurut saya itu suatu kecurangan, piring itukan seharusnya hadiah yang dikasih tetapi dicurangi untuk mendapatkan keuntungan.”⁶⁵

Alasan yang hampir sama juga disampaikan oleh salah satu masyarakat yang pernah tidak diberikan hadiah piring atas pembelian detergen Daia bernama Ibu Aisyah , yakni:

“ Saya pernah mengalami tidak diberikan piring saat membeli Daia berukuran 900 (sembilan ratus) gram alasan penjual saat itu hadiah piring nya tidak ada lagi karena habis, menurut saya penjual berbohong

⁶⁵ Ibu Yuni, (Masyarakat), Wawancara Pribadi, Pasar Sukaramai Kota Medan, tanggal 23 Januari 2020 pukul 17.35 WIB.

saat itu karena masih tercantum bacaan hadiah piring dikemasan Daia.

Saya tidak tahu jelas hukumnya tetapi menurut saya itu pasti berdosa, orang beli Daia ya harus dikasi piring kalau tidak ada hadiah jangan dijual detergennya.”⁶⁶

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada 7 (tujuh) orang masyarakat juga terdapat 3 (tiga) orang masyarakat yang pernah membeli hadiah piring Daia langsung kepada penjual. 3 (tiga) orang masyarakat yang membeli piring hadiah tersebut menyatakan kurang mengetahui kejelasan hukum dari wakil yang tidak memberikan hadiah pembelian detergen, tetapi mereka mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan penjual adalah perbuatan yang tidak baik karena penjual melakukan penipuan atau kecurangan kepada pembeli, berikut pernyataan pandangannya:

“Menurut saya, hukumnya mungkin tidak boleh karena mereka seperti menjual hak pembeli.”⁶⁷

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh masyarakat, maka diketahui bahwa pelaksanaan pemberian hadiah pembelian detergen yang

⁶⁶ Ibu Aisyah, (Masyarakat), Wawancara Pribadi, Pasar Sukaramai Kota Medan, tanggal 23 Januari 2020 pukul 17.50 WIB.

⁶⁷ Ibu El, (Masyarakat), Wawancara Pribadi, Pasar Sukaramai Kota Medan, tanggal 13 Januari 2020 pukul 13.34 WIB.

dilakukan oleh beberapa penjual di Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area Kotamadya Medan masih terdapat beberapa *wakil* yang tidak amanah dalam menyampaikan keinginan *muwakkil* dan mengakibatkan kerugian bagi pembeli dan muwakkil. Masyarakat belum mengetahui bahwa *wakil* (penjual) yang tidak amanah dianggap tidak menjalankan ketentuan *muwakkil* dan transaksinya menjadi batal dan Orang yang mewakili tidak boleh mengambil manfaat dari yang diwakilkan untuk dirinya ataupun perwaliannya. Masyarakat juga tidak tahu pasti kategori akad *wakalah* menurut mazhab syafi'i.

C. Hukum Terhadap Hadiah yang tidak Diberikan Atas Pembelian Detergen Daia Perspektif Mazhab Syafi'i

Tentang Hukum Pemberian kuasa, diantaranya hukum akad dan hukum perbuatan orang yang diberi kuasa. Menurut jumhur *fuqaha*, orang yang diberi kuasa boleh menarik penyerahan kuasa tersebut kapan saja menghendaki. Menurut Asyhab, pemberi kuasa boleh membebastugaskan penerima kuasa, selama beliau belum mendekati penyelesaian tugasnya. Penerima kuasa juga tidak boleh mengundurkan diri dari tugas

menyelesaikan pekerjaan, yang memberi kuasa tidak boleh membebastugaskan.

Menurut pendapat Malik dan Syafi'i, kehadiran pihak lawan (dalam persengketaan) tidak menjadi syarat terjadinya akad pemberian kuasa. Tetapi menurut Abu Hanifah, pihak lawan merupakan syarat. Malik juga berpendapat bahwa kehadiran pihak lawan tidak menjadi syarat untuk menetapkan pemberian kuasa itu di depan hukum. Tetapi Syafi'i berpendapat bahwa kehadiran pihak lawan itu menjadi syarat.⁶⁸ Dalam akad *Wakalah* setiap objek yang diwakilkan harus dijaga dan disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Orang yang mewakili harus jujur terhadap apapun yang diwakilkan. Apabila yang diwakilkan itu rusak dengan sendirinya, bukan karena kelalaian atau usahanya (orang yang mewakili), ia tidak menanggungnya, akan tetapi kalau kerusakan itu karenanya maka beliau harus bertanggung jawab atas kerusakannya. Dan wakil harus amanah dalam menyampaikan dengan memperhatikan setiap ketentuan yang diberikan muwakkil.

⁶⁸ Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h.273

Amanah secara etimologis (pendekatan kebahasaan/lughawi) dari bahasa arab dalam bentuk mashdar dari amanatan yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia amanah berarti pesan atau perintah. Menurut kamus Al-Munawir pengertian الامانة itu adalah segala yang diperintahkan Allah kepada hamba-Nya.⁶⁹

Kata amanah dikemukakan dalam Al-Qur'an semuanya bermakna menepati janji dan pertanggung jawaban. Amanah itu suatu tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang atau titipan yang diserahkan kepadanya untuk diserahkan kembali kepada orang yang berhak. Bahwasanya manusia adalah hakikatnya makhluk yang bersosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya, semata-mata tiada lain hanya untuk mencari ridha dari Allah SWT. Manusia beribadah adalah termasuk amanah yang diberikan Allah SWT. Pakar bahasa, Ibrahim Mustafa menjelaskan bahwasanya amanah mengandung arti pelunasan dan titipan. Di dalam bahasa Indonesia amanah berarti yang dipercayakan (dititipkan).⁷⁰

⁶⁹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab- Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 41

⁷⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Ensiklopedi Al-Qur'an Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 83

Dalam ungkapan lain amanah ada kaitannya dengan transparansi, sedangkan transparansi itu bagian dari kejujuran. Islam sudah sejak awal mengajarkan umpamanya dilarang *gulu'* (penghianatan), dalam perdagangan tidak boleh ada *gays* (penipuan), serta mengajarkan tentang tanggung jawab.

Hanya manusia sajalah sebagai makhluk yang memikul beban kewajiban dan tanggung jawab yang telah ditentukan batas-batas cirinya tersendiri di antara semua makhluk di alam semesta, yaitu berupa *akidah* (kepercayaan), pengetahuan atau hikmah. Kedudukannya adalah sebagai “kunci”.

Kata amanah sangat berkaitan dengan akad wakalah muqayyadah karena wakil harus memperhatikan ketentuan yang diberikan muwakkil. *Wakalah Muqayyadah* adalah *wakalah* dimana *muwakkil* membatasi tindakan *wakil* dan menentukan cara melaksanakan tindakan tersebut. Misalnya, “aku wakikan padamu untuk menjual rumahku ini dengan harga sekian”. Maka *wakil* dapat menjualnya dengan harga yang layak dan tidak terbatas dengan hari tertentu. Jika perwakilan bersifat terikat, *wakil* berkewajiban mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan. Ia tidak boleh menyalahinya kecuali kepada yang lebih baik dan

bermanfaat bagi orang yang mewakilkan bila yang mewakili menyalahi aturan-aturan yang telah disepakati ketika akad, penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang mewakilkan, maka tindakan tersebut batal menurut pandangan Imam Syafi'i. Sedangkan menurut mazhab Hanafi tindakan itu tergantung pada kerelaan orang yang mewakilkan. Jika yang mewakilkan membolehkannya, maka penjualannya menjadi sah, bila tidak meridhainya maka menjadi batal.⁷¹

Dalam ketentuan yang terdapat pada akad Wakalah Muqayyadah, Hukumnya, seorang *wakil* terikat, dengan apa yang ditentukan oleh *muwakkil*, artinya beliau mesti memerhatikan kaitan-kaitan atau syarat-syarat yang diberikan *muwakkil* sebisa mungkin, baik yang berhubungan dengan pihak pengakad, dengan objek akad, atau dengan alternatif yang diakadkan.⁷²

Dalam pelaksanaan pemberian hadiah atas pembelian detergen menggunakan skema akad wakalah muqayyadah pihak pengakad nya sudah ditentukan oleh muwakkil (produsen) dimana agen sebagai *wakil* pertama dan penjual detergen Daia sebagai *wakil* kedua dan Pembeli sebagai orang

⁷¹ Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, h.139.

⁷²Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, jilid IV, h. 155.

yang menerima objek *wakalah*. Dan objek akadnya adalah hadiah piring untuk pembelian detergen Daia berukuran 900 (sembilan ratus) gram.

Ketika *muwakkil* mengutuskan wakilnya untuk memberikan hadiah atas pembelian detergen Daia berukuran 900 (sembilan ratus) gram, penulis menemukan beberapa *Wakil* tidak amanah dalam menyampaikan hadiah kepada pembeli/konsumen. Penulis mewawancarai 10 (sepuluh) orang penjual detergen Daia yang ditetapkan sebagai *wakil* kedua oleh *muwakkil*. Dari hasil wawancara penulis dapat disimpulkan terdapat 1 (satu) orang penjual yang memanfaatkan objek yang diwakilkan untuk kebutuhannya sendiri dan sekaligus menjualnya, terdapat 1 (satu) orang penjual yang memanfaatkan objek yang diwakilkan untuk kebutuhannya sendiri, terdapat 5 (lima) orang penjual yang langsung menjual objek yang diwakilkan, terdapat 1 (satu) orang penjual yang mengatakan pembeli tidak mau menerima hadiah piring, dan terdapat 2 (dua) orang penjual yang lupa memberikan objek yang diwakilkan.

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa beberapa *wakil* yang tidak amanah dalam menyampaikan objek yang diwakilkan dan jika dikaitkan dengan pendapat Mazhab Syafi'i adalah

transaksinya menjadi batal. Pendapat mazhab Syafi'i tersebut terdapat pada kitab al- Fiqhu asy-Syafi'iyu al- Muyassar , sebagai berikut:

ومتى خالف الوكيل الموكل في بيع ماله، أو الشراء بعين ماله فيما لم يأذن له فيه، فتصرفه باطل،

لمخالفة إرادة الموكل.⁷³

Artinya: Bila wakil tidak menaati pewakil dalam penjualan harta, atau membeli dengan harta pewakil barang yang tidak pewakil izinkan maka transaksinya batal. Karena hal tersebut bertentangan dengan keinginan pewakil.

Berdasarkan wawancara penulis dengan 5 (lima) orang penjual bahwa alasan mereka tidak memberikan hadiah piring kepada konsumen yaitu dikarenakan hadiah piring tersebut dijual langsung oleh penjual kepada orang-orang yang membutuhkan. Dari alasan tersebut penulis mengkaitkan dengan pendapat ulama Mazhab Syafi'i yakni Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari yang menyatakan bahwa orang yang mewakili tidak boleh menjual muwakkil fiih kepada dirinya sendiri atau perwaliannya. Jadi dapat disimpulkan, bahwa wakil tidak boleh menjual objek yang diwakilkan itu kepada dirinya sendiri atau walinya, maka wakil juga tidak boleh menjual

⁷³ Wahbah az-Zuhaili, al- Fiqhu asy-Syafi'iyu al- Muyassar, h.635.

muwakkil fiih tersebut kepada orang lain tanpa adanya izin dari muwakkil.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Fathul Muin*, sebagai berikut:

(وَلَا يَبِيعُ) الْوَكِيلُ (لِنَفْسِهِ) وَمَوْلِيَّهِ وَإِنْ أَدِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَقَدْ رَلَهُ الثَّمَنُ خِلَا فَا لِابْنِ الرَّفْعَةِ، لَامْتِنَاعِ

اتِّحَادِ الْمُؤْجِبِ وَالْقَابِلِ: وَإِنْ انْتَفَعَتِ التُّهْمَةُ بِخِلَافِ أَبِيهِ وَوَلَدِهِ الرَّشِيدِ⁷⁴

Artinya: “Bagi *Wakil* tidak boleh menjual *muwakkil fih* kepada dirinya sendiri atau perwaliannya (anak kecil, orang gila atau bodoh yang dikuasai), sekalipun *muwakkil* telah memberinya izin dan menentukan harga penjualannya –lain halnya dengan pendapat Ibnu Rif’ah-, sebab terlarangnya terjadi ijab dan qabul dari satu pihak, sekalipun tidak ada kecurigaan. Lain halnya jika dijual kepada ayah *wakil* atau anaknya yang sudah rasyid.”

Penulis juga akan memaparkan pendapat-pendapat dari para ulama tentang pandangan mereka mengenai hukum terhadap hadiah yang tidak diberikan atas pembelian detergen Daia di Pasar Sukaramai diantaranya:

- Menurut Ustadz Sugianto M.A

“Jika berbicara mengenai amanah, maka amanah itu harus dijalankan oleh orang yang diberi amanah tersebut. Dalam pelaksanaan pemberian hadiah itukan perusahaan itu memberikan amanah agar hadiah piring itu disampaikan kepada konsumen. Dalam pelaksanaan seperti ini yang harus dipahami dan diperhatikan itu adalah masalah kejujuran. Jual beli yang

⁷⁴ Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari, *Fat-hul Mu'in*, h. 362.

dilaksanakan itu hukumnya dibolehkan namun jika salah satu pihak atau wakil tidak melaksanakan pemberian hadiah dan diambil keuntungan dari menjual hadiah tersebut itu sudah menyalahi dari kesepakatan kedua belah pihak. Konsumen tentunya juga mengetahui jika kita membeli Daia ukuran 900 (sembilan ratus) gram itu nanti akan diberikan hadiah piring dan itu adalah satu penarik yang diberikan perusahaan untuk konsumen. Jadi, distributor bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan apa yang disampaikan dari perusahaan yaitu “Jika ada konsumen membeli Daia ukuran 900 (sembilan ratus) gram hendaklah diberikan piring ini sebagai hadiah” . dan saya setuju dengan pendapat Mazhab Syafi’i .”⁷⁵

- Menurut Ustadz H. Alimuddin Simamora

“Menurut saya pelaksanaan pemberian hadiah yang mana memakai akad wakalah dan dikaitkan dengan pendapat Mazhab Syafi’i saya setuju, karena bagaimanapun sesuatu yang menurut produsen sudah memang dibutuhkan untuk hadiah itu harus dipertanggung jawabkan amanahnya. Hadiah itu tidak boleh di manfaatkan oleh penjual mau untuk keperluannya atau bahkan dijual. Dalam hal yang sama kalau itu sebagai perwakilan itukan amanah

⁷⁵ Bapak Ustadz Sugianto M.A, (Ustadz), Wawancara Pribadi, Masjid Baiturrahman Medan, tanggal 28 Februari 2020 pukul 13.38 WIB.

juga, tetap juga ia harus melaksanakan amanah tersebut. Jika ia mengabaikan maka ia harus menanggung resiko bahwa ia bukan orang yang amanah. Jika sudah menyangkut kepada jual beli yang tidak amanah itu sudah menyangkut kepada hal yang disebut curang. Dalam hal yang berkaitan dengan Mazhab Syafi'i itu tetap berlaku sampai sekarang. Dan dalam Mazhab-mazhab yang lain tentang hadiah, hadiah itu tidak bisa diganggu gugat. Rasul juga mengingatkan kepada para pedagang untuk tidak melakukan jual beli yang tidak amanah. Setiap penyimpangan dalam kategori tidak amanah dan menyangkut dengan masalah barangnya dan hasil dari penjualan hadiah tersebut itu sudah dikategorikan sebagai *riba*. Jika ada *urf* atau kebiasaan yang berlaku di suatu lingkungan dan tidak ada yang dirugikan tidak masalah. Tetapi dalam kenyataannya masih banyak terdapat pembeli yang merasa dirugikan disini.”⁷⁶

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum terhadap hadiah yang tidak diberikan atas pembelian detergen dengan skema akad wakalah di Pasar Sukaramai belum sesuai dengan pendapat Mazhab Syafi'i karena dalam pelaksanaannya masih

⁷⁶ Bapak Ustadz H. Alimuddin Simamora, (Ustadz), Wawancara Pribadi, Masjid Al-Hilal, tanggal 01 Maret 2020 pukul 19.15 WIB.

banyak terdapat pelaku usaha yang tidak amanah dalam menyampaikan *muwakkil fih* kepada konsumen. Dan para ulama yang penulis wawancarai juga setuju dengan pendapat Mazhab Syafi'i.

D. Analisis Penulis

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis menganalisa bahwa pokok persoalan yang menjadi dasar penulis mengangkat judul ini yakni adanya perbuatan penjual (*wakil* kedua) yang tidak menyampaikan amanah perusahaan untuk memberikan hadiah piring kepada setiap konsumen yang membeli detergen Daia berukuran 900 (sembilan ratus) gram dikarenakan beberapa faktor, yakni hadiah piring tersebut dimanfaatkan oleh wakil untuk kebutuhan diri sendiri padahal tidak jarang si penjual mendapatkan 1 (satu) piring bonus dari produsen tetapi ia malah memanfaatkan objek wakalah, hadiah piring tersebut dijual langsung oleh wakil kepada masyarakat, adanya pembeli yang tidak mau menerima hadiah piring tersebut dan terdapat juga pembeli yang meminta penukaran hadiah piring, dan terdapat beberapa wakil yang lupa memberikan hadiah piring. Sehingga ditemui beberapa pembeli yang tidak mendapatkan hadiah piring tersebut dikarenakan stok piring habis. Penulis menganalisis bahwa perbuatan penjual tersebut

dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam syara' karena para *wakil* tidak amanah dalam melakukan tugasnya, para *wakil* melakukan penipuan dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang diberikan *muwakkil*.

Setelah mengetahui Pandangan Mazhab Syafi'i terkait pelaksanaan pemberian hadiah pembelian detergen, maka penulis menganalisis bahwa wakil yang tidak melaksanakan perintah muwakkil (tidak jujur) di Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area Kotamadya Medan belum sesuai dengan Pendapat Mazhab Syafi'i. Berikut adalah pernyataannya:

ومتى خالف الوكيل الموكل في بيع ماله، أو الشراء بعين ماله فيما لم يأذن له فيه، فتصرفه باطل،

لمخالفة إرادة الموكل.⁷⁷

Artinya: Bila wakil tidak menaati pewakil dalam penjualan harta, atau membeli dengan harta pewakil barang yang tidak pewakil izinkan maka transaksinya batal. Karena hal tersebut bertentangan dengan keinginan pewakil.

Penulis menganalisis bahwa pendapat mazhab Syafi'i diatas merupakan pendukung bahwa *wakil* harus menaati setiap ketentuan yang diberlakukan oleh *muwakkil*. Dalam pernyataannya bahwa jika *wakil* tidak menaati

⁷⁷ Wahbah az-Zuhaili, al- Fiqhu asy-Syafi'iyu al- Muyassar, h.635.

muwakkil dalam penjualan harta dan penulis menganalisis bahwa pernyataan tersebut tidak hanya berlaku pada contoh ini saja, tetapi berlaku untuk semua barang yang diwakilkan dan sudah ada ketentuan-ketentuan khusus dari *muwakkil*. Ketika *wakil* sudah tidak menaati ketentuan yang diberikan *muwakkil*, maka berarti itu bertentangan dengan keinginan *muwakkil*. Dan transaksi yang dilakukannya terhadap harta *muwakkil* menjadi batal, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh *muwakkil*.

Penulis menganalisis dan memahami bahwa kejujuran dan kebenaran sangat penting bagi seseorang pedagang muslim walaupun ada kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, perbuatan demikian akan berdampak negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga pedagang itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, sikap dan tindakan yang seperti itu akan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah

dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”⁷⁸

Penulis menganalisis dan memahami bahwa segala sesuatu bisa menjadi terlarang memilikinya oleh karena cara mendapatkannya tidak diperbolehkan. Misalnya, diperoleh dengan cara mencuri, merampok, merampas milik orang lain, membungakan uang, dan korupsi. Islam mengajarkan tentang cara-cara memperoleh harta yang baik dan halal. Misalnya lewat berdagang dengan jujur, bertani, nelayan, jual beli, sewa menyewa, dan sejenisnya yang tidak mengakibatkan orang lain merugi dan apalagi celaka. Penulis menganalisis bahwa praktek yang dilakukan *wakil* sudah menunjukkan sikap tidak jujur dan membuat orang lain merugi.

Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁷⁹

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.180.

⁷⁹ *Ibid*, h.65.

Penulis menganalisis bahwa cara memperoleh harta yang dilakukan oleh *wakil* yang menjual objek wakalah merupakan cara yang dilarang syara', dikarenakan *wakil* mencari keuntungan dari menjual yang bukan haknya.

Penulis menemukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga dibahas mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha salah satunya adalah perjanjian pembelian berhadiah yang tidak ditepati oleh pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 (delapan) Tahun 1999 Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Bab IV Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, yang terdiri dari 10 (sepuluh) pasal, dimulai dengan pasal 8 (delapan) sampai dengan pasal 17 (tujuh belas).⁸⁰

Menurut penulis, menawarkan suatu barang atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 (tiga belas) ayat (1) dapat ditafsirkan dengan janji yang tidak ditepati dalam pemberian hadiah. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak melarang pembelian berhadiah, selama hadiah yang

⁸⁰ http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_8_99.htm di akses pada hari Jum'at tanggal 24 januari 2020 pukul 20.30

dijanjikan ditepati oleh pelaku usaha. Akan tetapi muncul berbagai persoalan manakala hadiah yang dijanjikan kepada konsumen diingkari. Seperti contoh, kita sering jumpai baik itu di pasar swalayan maupun di tempat lainnya dimana sering terpampang sebuah spanduk yang besar dan mencolok dengan menyebutkan pembelian berhadiah atau juga dapat ditemui langsung dalam kemasan produk. Salah satunya ada pada produk detergen Daia.

Namun, adakalanya jika kita membeli barang dan/atau jasa yang dipromosikan seperti di atas, ternyata persediaan hadiahnya telah habis, sehingga pada saat kita tanyakan kepada penjaga toko atau pelayanannya, dengan enteng dan ringan, mereka menjawabnya bahwa persediaan hadiah telah habis, sementara spanduk dan promosi yang melalui media cetak atau elektronik terus saja berjalan. Dari kejadian seperti di atas pelaku usaha tersebut telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan bagi pelaku usaha yang melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kesalahannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Hukum terhadap Hadiah yang tidak diberikan atas Pembelian Detergen Dengan Skema Akad Wakalah Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area Kotamadya Medan) dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Hadiah diperbolehkan dalam Islam karena maksud pemberian hadiah itu adalah untuk memuliakan penerimanya. hadiah adalah pemberian harta kepada seseorang untuk memuliakannya tanpa adanya paksaan dari keduanya. Dasar hukum hadiah terdapat dalam Alquran surah an-Nisa' ayat 4 . Mekanisme pemberian hadiah produk Daia menggunakan akad wakalah. Dalam Islam mensyaratkan *wakalah* karena manusia membutuhkannya. *al-wakalah* adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dan perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Dasar hukum wakalah terdapat dalam Alquran surah Ali-Imran ayat 173.

2. Pasar Tradisional Sukaramai terletak di Kecamatan Medan Area, tepatnya di persimpangan antara jalan Arief Rahman Hakim dengan jalan Sutrisno. Pasar Sukaramai berada di titik koordinat 3°34.9698°44.36. Dalam penyerahan hadiah atas pembelian detergen Daia menggunakan akad *wakalah muqayyadah*. dalam akad *wakalah muqayyadah wakil* mesti memerhatikan kaitan-kaitan atau syarat-syarat yang diberikan *muwakkil* sebisa mungkin, baik yang berhubungan dengan pihak pengakad, dengan objek akad, atau dengan alternatif yang diadakan. Penyerahan hadiah piring berawal dari Produsen (*Muwakkil*) yang memberikan kuasa kepada Agen (*Wakil* pertama) untuk menyerahkan hadiah piring kepada Toko Grosir, Kedai Tradisional, Penjual (*Wakil* kedua) yang menjual Detergen Daia berukuran 900 (sembilan ratus) gram. Lalu kemudian para penjual tersebut menyerahkan hadiah piring kepada pembeli Detergen Daia berukuran 900 (sembilan ratus) gram.
3. Setelah mengetahui Pandangan Mazhab Syafi'i terkait pelaksanaan pemberian hadiah pembelian detergen, maka penulis menganalisis bahwa wakil yang tidak melaksanakan perintah muwakkil (tidak jujur) di

Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area Kotamadya Medan belum sesuai dengan Pendapat Mazhab Syafi'i yaitu "Bila wakil tidak menaati pewakil dalam penjualan harta, atau membeli dengan harta pewakil barang yang tidak pewakil izinkan maka transaksinya batal. Karena hal tersebut bertentangan dengan keinginan pewakil". Pendapat mazhab Syafi'i tersebut merupakan pendukung bahwa *wakil* harus menaati setiap ketentuan yang diberlakukan oleh *muwakkil*. Dalam pernyataannya bahwa jika *wakil* tidak menaati *muwakkil* dalam penjualan harta dan penulis menganalisis bahwa pernyataan tersebut tidak hanya berlaku pada contoh ini saja, tetapi berlaku untuk semua barang yang diwakilkan dan sudah ada ketentuan-ketentuan khusus dari *muwakkil*. Ketika *wakil* sudah tidak menaati ketentuan yang diberikan *muwakkil*, maka berarti itu bertentangan dengan keinginan *muwakkil*.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya kepada semua pelaku usaha yang menjual detergen Daia di Pasar Sukaramai Kecamatan Medan area Kotamadya Medan memahami konsep akad *wakalah* dan memahami cara memperoleh harta yang dibenarkan oleh *syara'*;
2. Hendaknya perlu diadakan pengawasan oleh Pihak perusahaan kepada para pelaku usaha agar tidak sewenang-wenang dalam menyampaikan amanah perusahaan;
3. Hendaknya kepada seluruh pelaku usaha yang menjual detergen Daia di Pasar Sukaramai Kecamatan Medan area Kotamadya Medan untuk melakukan akad *wakalah* yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan menyampaikan amanah dan tidak menjual objek yang diwakilkan tersebut untuk kepentingan sendiri sehingga tidak adanya pihak pembeli yang merasa dirugikan;
4. Hendaknya perusahaan atau produsen mencari solusi lain untuk meningkatkan strategi penjualan produk mereka karena terdapat penjual yang merasa keberatan karena adanya pemberian hadiah kepada konsumen karena hadiah tersebut adalah amanah yang harus disampaikan.

5. Hendaknya kepada semua masyarakat atau pembeli yang membeli detergen Daia menerima hadiah piring tersebut dan meminta hadiah piring tersebut kepada pelaku usaha jika tidak diberikan dan hendaknya kepada semua masyarakat yang ingin melakukan transaksi Jual beli menanyakan asal barang yang diperjual belikan tersebut;

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Kitab

Abdul Aziz Al Malibari, Asy- Syekh Zainuddin bin. *Terjemah Fat-hul Mu'in Jilid 2*, Surabaya: Al-Hidayah

Abdul Aziz Al Malibari, Zainuddin bin . 2004. *Fat-hul Mu'in*. Beirut: Ibn Hazm

Al- Syaukani, Muttafaq 'alaih. 2000. *Nail al-Autar juz 4*, Kairo: Dar al-Hadis

Anas, Malik bin. 1985. *al-muwatta'* jilid 1, Beirut: dar al-tarats al-'arabi

An-Nawawi, Imam. 2011. *Shahih Muslim bi Syarh An Nawawi, Terj. Misbah, "Syarah Shahih Muslim"*, Jilid 12. Jakarta: Pustaka Azzam

An-Nawawi, *Rawdhah ath-Thalibin*. Mesir: al-Maktabah at-Taufiqiyah

Anwar, Moh. 1979. *Fiqh Islam: mu'amalah, munakahat, faro'id dan jinayah*, Bandung: P.T. Al-Ma'arif

Arikunto, Suharsimi . 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta

Ash- Shiddieqy, Hasbi . 1972. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta

Aziz Muhammad Azzam, Abdul. 2010. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah

Azizi Dahlan, Abdul. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve

- Az-Zuhaili, Wahbah. 2004. *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, jus IV, Beirut: Dar al-Fikr
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, jilid 4, Jakarta : Gema Insani
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2008. *al- Fiqhu asy-Syafi'iyu al- Muyassar*, Beirut: Dar al-Fikr
- Departemen Agama RI. 2000. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Diponegoro
- Hadi, Sutrisno. 1995. *"Metodologi Research" Jilid II* , Yogyakarta: Andi Offset
- Hanifah. 2017. *Wakalah Dalam Kontrak Jual Beli Menurut Imam Syafi'i*, Palembang: UIN Raden Fatah Palembang
- Ibrahim, Johnny, dkk,. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.
- Idris Asy Syafi'i, Muhammad bin. 2002. *Al Umm Jilid II*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah
- Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, Muhammad bin. 2013. *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram*, Terj. Muhammad Isn'an, "Subulus Salam"- Syarah Bulughul Maram". Jakarta: Darus Sunnah Press
- Lianasari, Wasita. 2016. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Piring Bonus di Toko Nurul Ilmu Maumere Nusa Tenggara Timur*, Surabaya: UIN Sunan Ampel
- Mardani. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana

- Moh. Salomo, Moh. Rifa'i. 1987. *Terjemah Khulasah : Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV Toha Pustaka
- Muhammad bin Khatib Al-Syarbini, Syamsuddin. 1997. *Mughni Al-Muhtaj* Jilid 2, Beirut: Dar Al-Ma'rifah
- Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Rusyd, Ibnu . 2016. *Edisi Indonesia: Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* Jilid 2, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah* juz 3, Mesir: Dar al-Fath li al- I'lami al-Arabiyy
- Sahabuddin. 2007. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, Jakarta: Lentera Hati
- Shihab, Muhammad Quraish. 2007. *Ensiklopedi Al-Qur'an Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Grafindo Persada
- Ulfa Syafwar, Munira. 2018. *Perjanjian Penerima Kuasa (Al-Wakil) Untuk Membeli barang terhadap dirinya sendiri Menurut Imam Syafi'i*, Medan: UIN Sumatera Utara
- Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Abul. 2007. *Bidayatul mujtahid*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Amani.
- Wajdi, Farid. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta:

Sinar Grafika

Wardi Muslich, Ahmad. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah

Yasid, Abu. 2002. *Fiqh Realitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Zakariyya Al-Anshari Asy- Syafi'i, Abi Yahya. *Asnal Mathalib* juz 5,
Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiya

B. Website

https://www.academia.edu/9252482/SEJARAH_SINGKAT_IMAM_ASY-SYAFI_I_DAN_MADZHABNYA di akses pada hari jum'at tanggal 12 Juni 2020 pukul 18.13

<http://e-journal.uajy.ac.id/1966/3/2TA12574.pdf> di akses pada hari rabu tanggal 05 februari 2020 pukul 16.51

<http://repository.unimus.ac.id/806/3/BAB%20II%20.pdf> di akses pada hari rabu tanggal 05 februari 2020 pukul 16.57

http://eprints.walisongo.ac.id/3781/3/102311034_Bab2.pdf di akses pada hari kamis tanggal 20 februari 2020 pukul 11.38

http://hukum.unsrat.ac.id//uu/uu_8_99.htm di akses pada hari Jum'at tanggal 24 januari 2020 pukul 20.30

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Daftar Wawancara Terhadap Penjual

1. Selamat pagi Bapak/Ibu, bolehkah saya mewawancarai Bapak/Ibu?

Siapa nama Bapak/Ibu?
2. Apakah saudara menjual produk detergen Daia?
3. Apakah ada hadiah piring untuk pembeli detergen Daia?
4. Adakah spesifikasi detergen Daia yang mendapatkan hadiah piring?
5. Apakah saudara pernah tidak memberikan hadiah piring kepada pembeli?
6. Jika pernah, apa alasan saudara tidak memberikan hadiah piring kepada pembeli?
7. Apakah ada pembeli yang komplain jika hadiah piring tidak diberikan?
8. Apakah saudara menjual hadiah piring Daia tersebut ?
9. Apakah saudara mengetahui bahwa tindakan saudara yang tidak memberikan hadiah piring kepada konsumen dan menjual hadiah piring jika di analisis akan merugikan pembeli tanpa disadari?

B. Daftar Wawancara Terhadap Agen Produk Detergen Daia

1. Selamat pagi Bapak, bolehkah saya mewawancarai Bapak? Siapa nama Bapak?
2. Apakah benar Bapak Agen dari Produk Detergen Daia?
3. Apakah benar Produk Daia berukuran 900 (sembilan ratus) gram mempunyai hadiah ?
4. Bagaimanakah Mekanisme Pemberian hadiah dari Produsen ke agen lalu dari agen ke penjual grosir ?
5. Apakah ada bukti penyerahan hadiah piring Daia dari pihak Produsen kepada Pihak Agen?
6. Apakah jumlah hadiah piring sesuai dengan stok produk detergen Daia?
7. Apakah benar pada kemasan Daia berukuran 900 (sembilan ratus) gram sudah tertera “gratis 1 piring”?

C. Daftar Wawancara Terhadap Masyarakat/Pembeli

1. Selamat pagi Bapak/Ibu, bolehkah saya mewawancarai Bapak/Ibu?
Siapa nama Bapak/Ibu?

2. Apakah saudara pernah membeli detergen Daia ukuran 900 (sembilan ratus) gram?
3. Apakah saudara mengetahui setiap pembelian detergen Daia ukuran 900 (sembilan ratus) gram akan mendapatkan hadiah piring?
4. Apakah saudara pernah tidak diberikan hadiah piring oleh penjual saat membeli detergen Daia?
5. Apakah alasan penjual tidak memberikan hadiah piring kepada saudara?
6. Apakah saudara mengetahui terdapat beberapa penjual yang menjual hadiah piring daia tersebut?
7. Apakah saudara pernah membeli hadiah piring tersebut?
8. Bagaimanakah saudara merasa diuntungkan atau dirugikan dengan adanya hadiah piring yang tidak diberikan dan dijual oleh penjual?
9. Apakah saudara mengetahui hukum dari tindakan yang dilakukan penjual?

D. Daftar Wawancara Terhadap Ulama

1. Selamat pagi Bapak Ustadz, bolehkah saya mewawancarai Bapak Ustadz? Siapa nama Bapak Ustadz?
2. Bagaimanakah Pandangan bapak terhadap Fenomena yang terjadi pada penjual produk detergen Daia dimana setiap pembelian produk Daia yang berukuran 900 (sembilan ratus) gram akan mendapatkan hadiah berupa 1 buah piring dan hadiah piring tersebut harus disampaikan oleh penjual kepada konsumen, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa penjual yang tidak amanah dalam menyampaikan hadiah piring tersebut.
3. Apakah hukum terhadap hadiah yang tidak diberikan atas pembelian detergen Daia tersebut ?
4. Apakah bapak setuju dengan pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan "Apabila *muwakkil* tidak terikat dengan *tasharruf* yang dilakukan *wakil* karena adanya penyalahan mandat, *wakil* dianggap *fudhuli*". Penyalahan mandat yang dilakukan *wakil* adalah *wakil* tidak menjalankan *tasharruf* yang diberikan *muwakkil* yaitu untuk memberikan hadiah piring kepada pembeli.

LAMPIRAN (DOKUMENTASI)

Dokumentasi dengan Penjual

1.		Dokumentasi dengan Bapak Samsul (Tanggal 10 Januari 2020 Pukul 15:56 WIB)
2.		Dokumentasi dengan Ibu Nita (Tanggal 10 Januari 2020 Pukul 16:02 WIB)

3.







Dokumentasi dengan
Bapak Dedy (Tanggal
10 Januari 2020
Pukul 16:09 WIB)

4.



Dokumentasi dengan
Ibu Evi (Tanggal 14
Januari 2020 Pukul
15:25 WIB)

5.		<p>Dokumentasi dengan Bapak M. Tarigan (Tanggal 14 Januari 2020 Pukul 15:31 WIB)</p>
6.		<p>Dokumentasi dengan Bapak Akmal (Tanggal 14 Januari 2020 Pukul 15:38 WIB)</p>
7.		<p>Dokumentasi dengan Bapak Ikram (Tanggal 14 Januari 2020 Pukul 15:47 WIB)</p>

8.		Dokumentasi dengan Ibu Jomet (Tanggal 12 Juni 2020 pukul 15.45 WIB)
9.	(Tidak mau didokumentasikan)	Wawancara dengan Bapak Ucok (Tanggal 18 Oktober 2019 pukul 15.30 WIB)
10.	(Tidak mau didokumentasikan)	Wawancara dengan Ibu Ika (Tanggal 14 Januari 2020 pukul 09.30 WIB.)

Dokumentasi dengan Masyarakat/Pembeli

1.		Dokumentasi dengan Ibu Wilda (Tanggal 22 Januari 2020 Pukul 15:31 WIB)
2.		Dokumentasi dengan Ibu Yuni (Tanggal 24 Januari 2020 Pukul 17:35 WIB)
3.		Dokumentasi dengan Ibu Mina (Tanggal 24 Januari 2020 Pukul 17:41 WIB)

4.		<p>Dokumentasi dengan Ibu Aisyah (Tanggal 24 Januari 2020 Pukul 17:50 WIB)</p>
5.		<p>Dokumentasi dengan Ibu Alisa (Tanggal 24 Januari 2020 Pukul 17:58 WIB)</p>
6.		<p>Dokumentasi dengan Ibu Puji (Tanggal 24 Januari 2020 Pukul 18.10 WIB)</p>

7



Dokumentasi
dengan Ibu El
(Tanggal 13
Januari 2020
Pukul 13.34
WIB)

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara. Penulis dilahirkan pada tanggal 22 Juni 1997, putri dari pasangan Samsul Tua Siregar dan Masnila Pane, penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis memiliki dua abang laki-laki. Yang pertama bernama Azwan Siregar dan yang kedua bernama Azwin Siregar.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD Swasta Taman Asuhan di Pematangsiantar pada tahun 2009, tingkat SMP di SMP Swasta Taman Asuhan Pematangsiantar pada tahun 2012, tingkat SMA di SMA Negeri 4 Pematangsiantar pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) tahun 2015.